

STRATEGI SRI LANKA DALAM MEMBANGUN KOHESI SOSIAL

SETELAH KRISIS 2020-2024

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD KAUTSAR WAFI

21323030

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

STRATEGI SRI LANKA DALAM MEMBANGUN KOHESI SOSIAL

SETELAH KRISIS 2020-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD KAUTSAR WAFI

21323030

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**STRATEGI SRI LANKA DALAM MEMBANGUN KOHESI SOSIAL
SETELAH KRISIS 2020-2024**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Ulumati Dewi, S.I.P., M.A.

Dosen Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
2. Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.I.P., M.A.
3. Khairul Munzilin, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are shown, each on a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

20 May 2026



Muhammad Kautsar Wafi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2 KRISIS SOSIAL POLITIK SRI LANKA DI ERA DINASTI RAJAPAKSA.....	19
2.1 Kondisi Sosial Politik di Era Dinasti Rajapaksa	20
2.2 Faktor Disintegrasi Masyarakat di Sri Lanka	22
2.3 Dampak Krisis Ekonomi dan Pemerintahan terhadap Kesejahteraan Sosial dan Struktur Masyarakat	25
2.4 Dinamika Solidaritas, Protes Nasional, dan Potensi Rekonsiliasi Sosial: Peran Masyarakat Sipil	28
2.5 Kesenjangan Geografis dan Ketidakmerataan Dampak Krisis: Perbedaan Urban–Rural dan Komunitas Minoritas	31
BAB 3 IMPLEMENTASI STRATEGI SRI LANKA DALAM MEMBANGUN KEMBALI KOHESI SOSIAL PASCA KRISIS	35

3.1 Peran Pemerintah dalam Membentuk Kohesi Sosial	Error! Bookmark not defined.
3.2 Strategi Pemerintah dalam Memperkuat <i>Inclusive Identity</i>	38
3.3 Membangun Kembali Kepercayaan (Trust) antara Negara dan Masyarakat	41
3.4 Peran Masyarakat Sipil, Aragalaya, dan Organisasi Internasional dalam Pemulihan Kohesi Sosial	48
3.5 Kerja Sama untuk Kepentingan Bersama (<i>Cooperation for the Common Good</i>)	53
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Rekomendasi	61
4.2.1 Rekomendasi bagi Pemerintah Sri Lanka	61
4.2.3 Rekomendasi bagi Penelitian Selanjutnya	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis dan Temuan	58
---	----

DAFTAR GAMBAR

[Gambar 2.1 Bentuk Dukungan Parlemen Mengosongkan Rapat Untuk Kondisi Krisis](#) **Error! Bookmark not defined.**

[Gambar 2.2 Kelangkaan Bensin Akibat Krisis di Srilanka](#) 21

[Gambar 2.3 Protes Anti Pemerintah Di Srilanka 2022](#) 21

[Gambar 2.4 Antrian Bahan Bakar di Kolombo, Sri Lanka, 07 Juni 2022.](#) **Error! Bookmark not defined.**

[Gambar 3.1 Presiden Sri Lanka di acara Hari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara \(ASEAN\) ke-56](#) 51

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi Sri Lanka dalam membangun kembali kohesi sosial setelah krisis multidimensi pada periode 2020–2024 yang ditandai oleh krisis ekonomi, instabilitas politik, serta meningkatnya fragmentasi sosial. Krisis tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan konsep kohesi sosial dari Leininger dkk. (2021) yang terdiri dari tiga indikator utama, yaitu inclusive identity, trust, dan cooperation for the common good. Argumen sementara penelitian ini menyatakan bahwa pemulihan kohesi sosial Sri Lanka dipengaruhi oleh kombinasi kebijakan ekonomi inklusif, rekonsiliasi lintas komunitas, serta penguatan partisipasi masyarakat sipil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi 2022 menjadi katalis melemahnya trust, namun sekaligus membuka ruang solidaritas lintas etnis melalui gerakan Aragalaya. Pemerintah pasca-krisis mulai menerapkan strategi kebijakan inklusif melalui reformasi jaminan sosial, pemerataan layanan publik, kerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF, serta revitalisasi agenda rekonsiliasi. Strategi ini berkontribusi pada pemulihan kohesi sosial secara bertahap melalui peningkatan identitas inklusif, pemulihan kepercayaan, dan penguatan kerja sama sosial.

Kata kunci: Aragalaya, inclusive identity, kohesi sosial, krisis 2020–2024, Sri Lanka, trust

ABSTRACT

This research examines Sri Lanka's strategies in rebuilding social cohesion after the multidimensional crisis during 2020–2024, characterized by economic collapse, political instability, and increasing social fragmentation. The crisis weakened the state's ability to provide basic necessities and accelerated the decline of public trust in government institutions. This study applies Leininger et al.'s (2021) social cohesion framework, consisting of three key indicators: inclusive identity, trust, and cooperation for the common good. The provisional argument suggests that Sri Lanka's post-crisis social cohesion recovery depends on a combination of inclusive economic policies, inter-communal reconciliation, and strengthened civic participation. The findings reveal that the 2022 economic crisis acted as a catalyst exposing the fragility of Sri Lanka's social foundations and severely eroded public trust. However, it also created opportunities for cross-ethnic solidarity through the Aragalaya protest movement. After 2022, the Sri Lankan government gradually shifted toward more inclusive and participatory strategies, including reforms in non-discriminatory social welfare, equal distribution of public services, cooperation with international institutions such as the IMF, and the revitalization of reconciliation and transitional justice agendas. These strategies contributed to reducing social fragmentation and gradually restoring social cohesion through improved inclusive identity, renewed trust, and strengthened cooperation for collective recovery.

Keywords: Aragalaya, inclusive identity, social cohesion, Sri Lanka crisis 2020–2024, trust

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dominasi politik keluarga Rajapaksa menjadi fenomena sentral dalam lanskap politik Sri Lanka sejak awal 2000-an. Mahinda Rajapaksa memimpin negara ini sebagai presiden dari 2005 hingga 2015, terutama dengan narasi kemenangan militer atas gerakan separatis Tamil Tigers (LTTE) pada 2009. Meskipun konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dan Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) secara resmi berakhir pada tahun 2009, akar konflik etnis yang melibatkan komunitas Sinhala, Tamil, dan Muslim tidak sepenuhnya terselesaikan. Pendekatan pascaperang yang lebih menekankan kemenangan militer dibandingkan rekonsiliasi justru memperkuat polarisasi identitas dalam masyarakat (Goodhand 2010). Pemerintah cenderung mengadopsi kebijakan yang mengutamakan mayoritas Sinhala-Buddhis, sementara kelompok minoritas masih menghadapi marginalisasi dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial.

Dalam konteks ini, konflik di Sri Lanka tidak dapat dipahami semata sebagai konflik bersenjata yang telah berakhir, melainkan sebagai konflik struktural yang terus berlanjut dalam bentuk ketimpangan representasi, diskriminasi kebijakan, serta rendahnya kepercayaan antar kelompok. Kondisi tersebut menjadi fondasi rapuh bagi kohesi sosial, sehingga ketika krisis ekonomi dan politik terjadi pada 2020–2022, ketegangan yang telah lama terpendam kembali muncul dalam bentuk fragmentasi sosial yang lebih luas (Lewis 2010). Kemenangan ini dimanfaatkan

sebagai simbol nasionalisme Sinhala-Buddhist yang memperkuat dukungan politik bagi keluarga Rajapaksa. Gotabaya Rajapaksa, adik Mahinda, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Pertahanan, dipandang sebagai arsitek kemenangan militer dan kemudian menggunakannya sebagai modal politik ketika mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019. Dengan latar belakang militer dan citra sebagai “*strongman*”, ia berhasil memenangkan pemilu presiden dengan suara mayoritas, didorong oleh sentimen keamanan setelah serangan bom Paskah pada April 2019 yang mengguncang Sri Lanka (Dilrukshi Handunnetti 2022).

Sejak awal pemerintahannya, Gotabaya Rajapaksa berupaya mengonsolidasikan kekuasaan eksekutif melalui Amandemen Konstitusi ke-20 pada tahun 2020. Amandemen ini memperluas wewenang presiden secara signifikan, termasuk dalam hal pengangkatan pejabat publik, pengendalian lembaga-lembaga negara, dan mengurangi independensi parlemen. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya otoritarianisme dan melemahkan mekanisme check and balance dalam sistem politik Sri Lanka. Di satu sisi, Rajapaksa berusaha membangun citra stabilitas politik, namun di sisi lain kebijakan tersebut memicu kritik luas dari oposisi politik, kelompok masyarakat sipil, serta komunitas internasional yang menilai Sri Lanka bergerak menuju konsentrasi kekuasaan di tangan satu keluarga (Tamanna Salikuddin 2022).

Kebijakan ekonomi Rajapaksa menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kejatuhannya. Pada akhir 2019, ia memperkenalkan kebijakan pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Sri Lanka dengan tujuan merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini justru membuat pendapatan negara menurun drastis dan memperburuk defisit fiskal. Akibatnya, kemampuan

pemerintah dalam memenuhi kewajiban internasional dan membiayai kebutuhan domestik semakin melemah. Ketika pandemi COVID-19 melanda pada 2020, ekonomi Sri Lanka terpukul lebih parah karena industri pariwisata yang menyumbang devisa besar mengalami kehancuran. Dalam situasi itu, pemotongan pajak terbukti menjadi kebijakan kontraproduktif yang semakin mempersempit ruang fiskal negara (Krutika Pathi 2022).

Selain pemotongan pajak, kebijakan pertanian juga menjadi sumber ketidakpuasan rakyat. Pada April 2021, Rajapaksa secara tiba-tiba melarang impor pupuk kimia dan pestisida dengan alasan mendorong pertanian organik. Keputusan mendadak ini menyebabkan penurunan produksi pertanian secara signifikan, termasuk beras yang merupakan makanan pokok, serta teh yang menjadi komoditas ekspor utama Sri Lanka. Akibatnya, ketahanan pangan nasional terganggu, harga-harga melonjak, dan defisit perdagangan semakin melebar karena pemerintah harus mengimpor pangan. Kebijakan ini memperlihatkan lemahnya perencanaan dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengantisipasi dampak sosial-ekonomi dari sebuah transformasi besar di sektor pertanian (Anu Anwar 2022).

Krisis ekonomi semakin memburuk ketika Sri Lanka menghadapi inflasi ekstrem, kekurangan bahan bakar, obat-obatan, dan pemadaman listrik panjang pada 2022. Cadangan devisa yang menipis membuat pemerintah tidak mampu membayar utang luar negeri yang mencapai lebih dari USD 50 miliar. Pada Maret 2022, Sri Lanka bahkan gagal membayar utang luar negeri untuk pertama kalinya dalam sejarah, menandai kebangkrutan negara. Krisis multidimensi ini memicu kemarahan rakyat yang sebelumnya mendukung Rajapaksa, hingga approval rating pemerintah merosot ke titik terendah. Kondisi sehari-hari rakyat yang sulit,

ditambah dengan sikap represif pemerintah seperti jam malam dan pembatasan media sosial, mempercepat delegitimasi politik Rajapaksa di mata publik (Tamanna Salikuddin 2022).

Puncak krisis ditandai dengan lahirnya gerakan protes rakyat yang dikenal dengan nama *Aragalaya* (yang berarti “perjuangan” dalam bahasa Sinhala). Gerakan ini dimulai sejak awal April 2022 di Galle Face Green, Kolombo, dan meluas ke seluruh negeri. Protes ini unik karena melibatkan partisipasi lintas etnis, agama, dan kelas sosial, yang selama ini terpecah akibat konflik identitas. Para demonstran tidak hanya menuntut pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa, tetapi juga menyerukan perubahan struktural dalam sistem politik Sri Lanka yang dianggap korup, nepotistik, dan gagal mengelola ekonomi. Aksi massa tersebut mencerminkan lahirnya solidaritas baru di tengah krisis, serta menjadi simbol kekecewaan rakyat terhadap dinasti politik (Alan Keenan 2022).

Pada Mei 2022, protes semakin meluas dan menekan Mahinda Rajapaksa untuk mundur dari jabatan Perdana Menteri setelah terjadi bentrokan mematikan antara pendukung pemerintah dan demonstran. Keputusan Gotabaya menunjuk Ranil Wickremesinghe sebagai Perdana Menteri baru justru menimbulkan kontroversi, karena ia dianggap bagian dari elit lama yang tidak memiliki legitimasi rakyat. Protes tetap berlangsung dan mencapai klimaks pada 9 Juli 2022 ketika ribuan demonstran menyerbu kediaman resmi presiden di Kolombo. Tekanan massa yang luar biasa memaksa Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke Maladewa dan kemudian ke Singapura, sebelum akhirnya menyampaikan pengunduran dirinya melalui email pada 14 Juli 2022. Pengunduran diri ini menandai runtuhnya

kekuasaan dinasti Rajapaksa setelah hampir dua dekade mendominasi politik Sri Lanka (Isaac Chotiner 2022).

Pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa bukan hanya hasil dari krisis ekonomi, tetapi juga mencerminkan kegagalan model politik berbasis dinasti dan nasionalisme mayoritarian yang mereka bangun. Rezim Rajapaksa tidak mampu mengantisipasi dampak kebijakan populis dan otoritarian yang melemahkan daya tahan sosial, politik, dan ekonomi negara. Dari perspektif kohesi sosial, kejatuhan Rajapaksa juga menunjukkan bahwa meskipun Sri Lanka lama terpecah secara etnis, krisis ekonomi berhasil menyatukan rakyat lintas identitas dalam sebuah gerakan kolektif melawan pemerintah. Dengan demikian, turunnya Gotabaya Rajapaksa menjadi momen penting yang menegaskan kembali kekuatan rakyat dalam demokrasi, serta pelajaran mengenai pentingnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Neil DeVotta 2022).

Selain itu, pemilihan Sri Lanka sebagai fokus penelitian memiliki urgensi tersendiri dibandingkan negara lain seperti Bangladesh dan Myanmar. Bangladesh relatif menunjukkan stabilitas ekonomi dan institusional, sehingga tidak mengalami krisis multidimensi yang simultan (World Bank 2023). Sementara Myanmar lebih didominasi oleh konflik bersenjata pascakudeta 2021, sehingga konteksnya berbeda karena berfokus pada perang sipil (International Crisis Group 2022).

Sebaliknya, Sri Lanka menghadirkan kombinasi krisis ekonomi, politik, dan sosial secara bersamaan, yang menjadikannya contoh nyata krisis multidimensional (DeVotta 2022). Selain itu, munculnya solidaritas lintas etnis melalui gerakan

Aragalaya menunjukkan dinamika unik dalam pemulihan kohesi sosial di tengah krisis (Keenan 2022). Oleh karena itu, Sri Lanka menjadi kasus yang lebih relevan untuk menganalisis strategi pembangunan kembali kohesi sosial dalam kondisi krisis yang kompleks.

Krisis multidimensi di Sri Lanka pada 2020–2022 menunjukkan adanya kontradiksi dalam dinamika sosial masyarakat. Di satu sisi, krisis ekonomi menyebabkan melemahnya kohesi sosial akibat menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memburuknya kondisi ekonomi masyarakat (International Monetary Fund 2023; World Bank 2023).

Namun di sisi lain, krisis yang sama justru memunculkan solidaritas baru melalui gerakan Aragalaya yang melibatkan masyarakat lintas etnis dan kelas sosial dalam tuntutan bersama terhadap perubahan politik (International Crisis Group 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah “Bagaimana strategi Sri Lanka dalam membangun kembali kohesi sosial pasca-krisis?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan melemahnya kohesi sosial Sri Lanka pada periode krisis 2020–2022.
2. Menjelaskan strategi yang ditempuh Sri Lanka dalam membangun kohesi sosial pasca-krisis.

1.4 Cakupan penelitian

Secara temporal, penelitian difokuskan pada periode 2020–2024, yakni masa krisis multidimensi yang dialami Sri Lanka hingga fase awal pemulihan pasca-krisis. Rentang waktu ini dipilih karena mencakup fase penting dari keruntuhan ekonomi dan politik yang terjadi pada 2020–2022, serta langkah-langkah strategis yang mulai diambil pemerintah Sri Lanka untuk membangun kembali kohesi sosial hingga 2024. Pemilihan batas akhir tahun 2024 juga didasarkan pada indikator ekonomi makro, khususnya tingkat inflasi, yang menunjukkan tren stabilisasi setelah mengalami lonjakan ekstrem pada puncak krisis tahun 2022. Inflasi Sri Lanka yang sempat mencapai tingkat sangat tinggi (hiperinflasi relatif) mulai menurun secara signifikan pada periode 2023–2024 seiring dengan implementasi reformasi fiskal, kebijakan moneter ketat, serta program bantuan dari lembaga internasional seperti IMF. Penurunan inflasi ini menjadi indikator penting bahwa Sri Lanka telah memasuki fase awal pemulihan

ekonomi, yang secara langsung berdampak pada perbaikan kondisi sosial dan peluang rekonstruksi kohesi sosial.

Adapun secara substansial, penelitian ini menyoroti strategi Sri Lanka dalam membangun kohesi sosial melalui tiga dimensi utama: politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Dimensi politik meliputi reformasi konstitusi, kebijakan rekonsiliasi, serta upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dimensi ekonomi menekankan pada program pemulihan krisis, distribusi kesejahteraan, serta peran lembaga internasional. Dengan batasan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih terarah terhadap strategi Sri Lanka dalam membangun kohesi sosial pasca-krisis.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kanishka Goonewardena berjudul “Populism, Nationalism and Marxism in Sri Lanka: From Anti-Colonial Struggle to Authoritarian Neoliberalism” membahas hubungan antara nasionalisme etnis, populisme, dan kemunduran gerakan kiri di Sri Lanka sejak masa kolonial hingga era neoliberalisme modern. Penelitian ini menjelaskan bahwa menguatnya ideologi Sinhala-Buddhist majoritarianism dan populisme nasionalis telah menggeser politik kiri yang sebelumnya memiliki pengaruh besar dalam perjuangan anti-kolonial dan kebijakan kesejahteraan sosial di Sri Lanka. Goonewardena berargumen bahwa sejak penerapan kebijakan ekonomi neoliberal pada 1977, Sri Lanka mengalami transformasi menuju authoritarian-populist neoliberalism yang memperkuat eksklusivitas etnis dan memperlemah solidaritas sosial masyarakat.

Kondisi tersebut kemudian menciptakan polarisasi sosial-politik yang berkepanjangan, memperdalam konflik etnis, serta melemahkan kohesi sosial nasional.

Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena menunjukkan bahwa krisis multidimensi di Sri Lanka tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh struktur politik dan ideologi nasionalisme mayoritarian yang telah berkembang sejak lama. Temuan Goonewardena membantu menjelaskan bagaimana lemahnya inklusivitas sosial dan dominasi identitas Sinhala-Buddhist turut berkontribusi terhadap melemahnya community resilience di Sri Lanka. Namun demikian, penelitian Goonewardena lebih berfokus pada analisis historis-politik mengenai populisme, nasionalisme, dan kemunduran gerakan kiri, sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti dampak ketiadaan community resilience terhadap kondisi ekonomi dan kohesi sosial Sri Lanka pada periode krisis 2019–2022 (Goonewardena 2020).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Asantha Senevirathna berjudul “Sri Lanka and the Covid 19 Crisis: Strategies and Future Challenges” membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di Sri Lanka pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi Sri Lanka karena terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sudah rentan akibat utang luar negeri, lemahnya pertumbuhan ekonomi, dan keterbatasan kapasitas negara dalam menghadapi krisis. Pemerintah Sri Lanka menerapkan berbagai strategi seperti lockdown nasional, pembatasan mobilitas, contact tracing, dan kebijakan darurat kesehatan untuk

menekan penyebaran virus. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan berupa menurunnya sektor pariwisata, meningkatnya pengangguran, terganggunya aktivitas perdagangan, serta melemahnya pendapatan masyarakat.

Senevirathna juga menjelaskan bahwa pandemi tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi berkembang menjadi krisis multidimensi yang memengaruhi stabilitas sosial dan efektivitas governance di Sri Lanka. Kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya kapasitas negara dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat ketika menghadapi tekanan ekonomi dan politik secara bersamaan. Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena membantu menjelaskan bagaimana pandemi COVID-19 menjadi pemicu awal memburuknya krisis ekonomi dan sosial Sri Lanka pada periode 2020–2022. Selain itu, penelitian ini mendukung argumentasi bahwa melemahnya kohesi sosial memperburuk kemampuan masyarakat dalam menghadapi krisis berkepanjangan. Namun demikian, penelitian Senevirathna lebih berfokus pada strategi pemerintah dan tantangan penanganan pandemi, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis dampak ketiadaan community resilience terhadap kondisi ekonomi dan kohesi sosial di Sri Lanka pasca-krisis (Senevirathna 2020).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh David G. Lewis berjudul “Sri Lanka’s Schmittian Peace: Sovereignty, Enmity and Illiberal Order” menganalisis dinamika politik pascaperang di Sri Lanka dengan menggunakan konsep illiberal peace. Lewis menjelaskan bahwa setelah berakhirnya perang saudara pada tahun 2009, Sri Lanka tidak sepenuhnya membangun perdamaian yang inklusif,

melainkan menciptakan suatu tatanan stabilitas politik yang bersifat eksklusif dan cenderung otoriter. Dalam kerangka ini, negara memposisikan dirinya sebagai aktor utama yang menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, namun pada saat yang sama mempertahankan konstruksi “musuh” terhadap kelompok minoritas tertentu, khususnya komunitas Tamil. Hal ini mencerminkan pendekatan Schmittian, di mana politik didasarkan pada dikotomi antara kawan dan lawan, sehingga membatasi ruang bagi rekonsiliasi yang inklusif.

Lewis menekankan bahwa stabilitas yang dibangun melalui pendekatan illiberal peace justru berpotensi memperlemah kohesi sosial karena tidak diiringi dengan upaya integrasi politik dan sosial yang menyeluruh. Eksklusi politik, lemahnya kepercayaan terhadap institusi negara, serta tidak terpenuhinya keadilan transisional menjadi faktor yang menghambat terbentuknya solidaritas sosial di tingkat nasional. Dalam konteks ini, perdamaian yang bersifat formal tidak secara otomatis menghasilkan ketahanan sosial (social resilience), melainkan menyisakan kerentanan struktural yang dapat muncul kembali dalam bentuk krisis sosial maupun politik di masa depan (Lewis 2020).

Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa krisis Sri Lanka merupakan hasil interaksi antara faktor struktural politik, ekonomi, dan sosial yang telah berkembang dalam jangka panjang. Goonewardena menekankan bahwa dominasi nasionalisme Sinhala-Buddhist dan populisme telah memperkuat eksklusivitas etnis serta melemahkan kohesi sosial, sementara Senevirathna menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi pemicu yang mempercepat memburuknya krisis ekonomi dan menguji kapasitas negara dalam menjaga stabilitas sosial. Di sisi lain, Lewis menjelaskan bahwa tatanan politik

pascaperang yang bersifat *illiberal peace* turut mempertahankan eksklusi politik dan menghambat terbentuknya integrasi sosial yang inklusif. Dengan demikian, ketiga studi ini menegaskan bahwa lemahnya kohesi sosial dan *community resilience* di Sri Lanka tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh struktur politik yang eksklusif dan kegagalan dalam membangun perdamaian yang inklusif, sehingga memperdalam kerentanan masyarakat dalam menghadapi krisis 2019–2022. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi celah kajian dengan menganalisis strategi Sri Lanka setelah krisis 2020–2024, khususnya dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi oleh penelitian terdahulu.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kohesi sosial merupakan konsep penting dalam kajian pembangunan dan stabilitas masyarakat. Ia berfungsi sebagai “perekat” yang memungkinkan individu dan kelompok berbeda untuk hidup bersama secara damai, bekerja sama, dan membangun masa depan kolektif. Menurut Leininger dkk. (2021), kohesi sosial dapat dipahami melalui tiga indikator utama yang saling berkaitan, yaitu *inclusive identity*, *trust*, dan *cooperation for the common good*. Ketiga indikator ini menjadi kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana masyarakat dapat mengatasi perbedaan internal dan mencapai tujuan bersama.

1. Inclusive Identity

Indikator pertama adalah *inclusive identity*, yaitu sejauh mana identitas yang ada dalam masyarakat bersifat inklusif dan mampu mengakomodasi keberagaman. Identitas inklusif memungkinkan individu dengan latar belakang etnis, agama, atau

budaya yang berbeda merasa menjadi bagian dari komunitas yang sama. Identitas yang eksklusif justru cenderung memperkuat “ingroup bias”, yakni kecenderungan untuk hanya mempercayai atau mengutamakan kelompok sendiri sambil mengeksklusi kelompok lain.

Dalam perspektif kohesi sosial, semakin tinggi tingkat inklusivitas identitas dalam suatu masyarakat, semakin kuat pula rasa kebersamaan dan solidaritas kolektif. Konsep ini sejalan dengan gagasan bahwa kohesi sosial tidak hanya bergantung pada identitas tunggal, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk merangkul identitas yang kompleks dan berlapis. Dengan kata lain, *inclusive identity* adalah fondasi pertama yang menentukan apakah masyarakat dapat hidup dalam kesetaraan dan saling menghargai.

2. Trust

Indikator kedua adalah *trust*, yang dipahami sebagai tingkat kepercayaan antarindividu maupun kepercayaan terhadap institusi publik. Terdapat dua dimensi utama kepercayaan:

- Horizontal trust, yaitu kepercayaan antarwarga atau antar-kelompok.
- Vertical trust, yaitu kepercayaan warga terhadap institusi negara dan aturan formal.

Keduanya berperan penting dalam menjaga kohesi sosial. Tanpa kepercayaan, masyarakat akan cenderung terjebak dalam kecurigaan, konflik, serta kesulitan bekerja sama. Sebaliknya, kepercayaan yang tinggi mendorong rasa aman, memperkuat partisipasi publik, dan meningkatkan legitimasi lembaga negara. Dalam kerangka ini, *trust* tidak hanya menjadi indikator, tetapi juga prasyarat bagi terbentuknya kerjasama sosial yang lebih luas.

3. Cooperation for the Common Good

Indikator ketiga adalah *cooperation for the common good*, yakni kesediaan individu maupun kelompok untuk bekerja sama demi kepentingan kolektif. Orientasi pada kepentingan bersama menuntut adanya solidaritas, di mana aktor bersedia menanggung biaya atau mengurangi kepentingan pribadinya demi kesejahteraan masyarakat luas.

Bentuk nyata dari *cooperation for the common good* dapat dilihat dalam partisipasi warga dalam organisasi sosial, keterlibatan dalam kegiatan sukarela, maupun dukungan terhadap kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan umum. Dimensi ini menekankan bahwa kohesi sosial bukan hanya sekadar sikap, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang berkontribusi pada kesejahteraan kolektif.

Keterkaitan Ketiga Indikator

Ketiga indikator ini saling memperkuat satu sama lain. Identitas inklusif menciptakan rasa kebersamaan, yang pada gilirannya memperbesar kemungkinan terbangunnya kepercayaan. Kepercayaan kemudian menjadi landasan bagi kerjasama lintas kelompok, sehingga tercipta orientasi kolektif pada kebaikan bersama. Sebaliknya, bila salah satu indikator melemah—misalnya identitas yang eksklusif atau rendahnya kepercayaan—maka kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi kepentingan bersama juga akan terhambat.

Dengan demikian, kerangka pemikiran kohesi sosial melalui tiga indikator ini memberikan perspektif analitis yang jelas: *inclusive identity* adalah fondasi, *trust* adalah penghubung, dan *cooperation for the common good* adalah manifestasi nyata dari masyarakat yang kohesif (Leininger et al., 2021).

1.7 Argumen Sementara

Krisis multidimensi yang melanda Sri Lanka pada 2020–2024, ditandai oleh krisis ekonomi, politik, dan sosial, telah menyingkap rapuhnya fondasi kohesi sosial di negara tersebut. Krisis ini tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang berujung pada kelangkaan bahan pokok, inflasi tinggi, serta runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memperparah fragmentasi sosial antara komunitas etnis, agama, dan kelas sosial. Dalam situasi ini, strategi Sri Lanka untuk membangun kembali kohesi sosial menjadi sebuah kebutuhan mendesak sekaligus tantangan besar.

Argumen sementara skripsi ini adalah bahwa upaya Sri Lanka dalam membangun kohesi sosial setelah krisis 2020–2024 dapat dipahami melalui kombinasi strategi kebijakan inklusif, rekonsiliasi antar-komunitas, dan penguatan partisipasi sipil. Pertama, kebijakan ekonomi inklusif diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, karena krisis ekonomi telah menjadi pemicu utama disintegrasi sosial. Pemerataan bantuan, stabilisasi harga, serta transparansi kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai fondasi awal membangun solidaritas sosial lintas kelompok.

Kedua, rekonsiliasi antar-komunitas etnis dan agama harus kembali dihidupkan, mengingat sejarah panjang Sri Lanka yang ditandai oleh konflik etnopolitik. Krisis 2020–2024 justru membuka peluang solidaritas baru, seperti yang terlihat pada gerakan protes lintas etnis di Colombo pada 2022, di mana kelompok Sinhala, Tamil, dan Muslim bersatu menuntut perubahan politik. Potensi solidaritas inilah yang dapat menjadi titik tolak strategi kohesi sosial jangka panjang.

Ketiga, partisipasi sipil menjadi pilar penting dalam mengembalikan legitimasi negara. Krisis telah menunjukkan lemahnya institusi demokratis Sri Lanka; oleh karena itu, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan memperkuat peran masyarakat sipil akan memperbesar rasa memiliki terhadap negara.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa strategi Sri Lanka dalam membangun kohesi sosial pasca-krisis tidak hanya bergantung pada pemulihan ekonomi, tetapi juga pada keberhasilan mengintegrasikan dimensi rekonsiliasi dan partisipasi politik. Tanpa kombinasi ini, upaya negara hanya akan menghasilkan stabilitas semu yang berpotensi memicu krisis berikutnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang fokus pada proses dan makna hasil. Metode penelitian ini didasarkan pada studi literatur, dan penulis melakukan analisis berdasarkan data dari berbagai studi literatur, yang kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Metode ini cocok untuk menyoroti isu Sri Lanka dalam membangun kohesi sosial setelah krisis pada tahun 2020-2024 dengan argumen yang relevan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemerintah Sri Lanka, dengan Anura Kumara Dissanayake dan Ranil Wickremesinghe sebagai aktor utama, sementara objek penelitian adalah faktor-faktor yang menyebabkan krisis sosial yang terjadi di Sri Lanka pada tahun 2020-2024.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dan digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama. Data ini biasanya berupa catatan harian atau laporan penulis sebelumnya. Dan penulis menggunakan data berupa literatur seperti buku, jurnal, dan artikel dalam penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian, langkah pertama yang diambil oleh penulis adalah melakukan riset literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, dan berita. Setelah itu, penulis akan memilih data yang paling relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya, penulis akan mengelompokkan topik tersebut ke dalam beberapa sub-bab dan menyajikan data dengan narasi deskriptif. Akhirnya, penulis akan menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan narasi yang telah disajikan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan diuraikan secara terperinci dalam empat bab utama:

- a. **Bab pertama** akan memperkenalkan latar belakang penelitian mengenai krisis multidimensi Sri Lanka 2020–2024, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka yang relevan, kerangka pemikiran menggunakan konsep kohesi sosial (inclusive identity, trust, cooperation for the common good), argumentasi awal, serta metode penelitian yang digunakan.
- b. **Bab 2** fokus pada pokok-pokok kajian teoretis dan konseptual yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Bab ini menguraikan kondisi

sosial politik di era dinasti rajapaksa, lalu faktor disintegrasi masyarakat di sri lanka, juga konsep kohesi sosial, rekonsiliasi, identitas inklusif, trust, partisipasi masyarakat, serta mengkaji penelitian dan literatur terdahulu terkait konflik Sri Lanka, dinamika etno-politik, serta faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya kohesi sosial selama krisis 2020–2022.

- c. **Bab 3** menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi strategi Sri Lanka dalam membangun kembali kohesi sosial pasca-krisis. Pembahasan mencakup analisis tentang faktor melemahnya kohesi sosial, strategi pemerintah dalam memperkuat inclusive identity, meningkatkan trust antara negara dan masyarakat, serta mendorong cooperation for the common good. Bab ini juga menganalisis peran masyarakat sipil, organisasi sosial, serta inisiatif rekonsiliasi yang berkontribusi pada pemulihan kohesi sosial.
- d. **Bab 4** menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari seluruh pembahasan penelitian, yang merangkum temuan utama terkait upaya Sri Lanka dalam membangun kohesi sosial setelah krisis multidimensi. Bab ini juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah, masyarakat sipil, serta penelitian selanjutnya yang relevan dengan penguatan kohesi sosial di masa depan.

BAB 2

KRISIS SOSIAL POLITIK SRI LANKA DI ERA DINASTI RAJAPAKSA

Untuk memahami krisis sosial-politik Sri Lanka pada era dinasti Rajapaksa, penting untuk melihatnya dalam konteks konflik historis yang telah berlangsung lama. Sri Lanka memiliki sejarah panjang konflik etnopolitik yang berakar pada ketimpangan antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil, yang mencapai puncaknya dalam perang saudara selama hampir tiga dekade (1983–2009) (Thurairajah 2020; Åkebo dan Bastian 2021). Konflik ini tidak hanya menghasilkan kekerasan berskala besar, tetapi juga meninggalkan warisan ketidakpercayaan, trauma kolektif, dan segregasi sosial yang mendalam.

Pascaperang, negara gagal membangun rekonsiliasi yang inklusif. Alih-alih mengintegrasikan komunitas yang terpecah, kebijakan negara justru memperkuat dominasi mayoritas melalui pendekatan keamanan dan nasionalisme. Akibatnya, konflik tidak benar-benar berakhir, melainkan bertransformasi menjadi ketegangan laten yang terus memengaruhi hubungan antar kelompok dalam masyarakat (Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2020). Dalam situasi seperti ini, krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada 2020–2022 berfungsi sebagai katalis yang mempercepat munculnya kembali fragmentasi sosial yang telah lama ada (Reuters 2024).

2.1 Kondisi Sosial Politik di Era Dinasti Rajapaksa

Situasi sosial politik Sri Lanka pada era dinasti Rajapaksa ditandai oleh konsolidasi kekuasaan yang sangat kuat, meningkatnya otoritarianisme, serta melemahnya institusi-institusi demokrasi. Ketika Gotabaya Rajapaksa memenangkan pemilihan presiden pada 2019, ia memperkuat kekuasaan eksekutif melalui 20th Amendment yang mengembalikan kewenangan presiden dalam mengangkat hakim, pejabat publik, dan anggota komisi independen tanpa mekanisme pengawasan yang memadai (Uyangoda, 2021). Amandemen ini secara signifikan melemahkan checks and balances dan menggeser Sri Lanka menuju pola pemerintahan yang semakin sentralistik. DeVotta (2022) menegaskan bahwa kebangkitan kembali Rajapaksa ke tampuk kekuasaan memperkuat bentuk familial authoritarianism, di mana keputusan strategis negara berada dalam kendali satu keluarga dengan minim konsultasi publik atau kajian institusional.

Selain itu, era Rajapaksa juga ditandai dengan menguatnya nasionalisme Sinhala-Buddhis sebagai basis legitimasi politik. Pemerintahan Gotabaya memanfaatkan narasi keamanan, terutama pasca bom Paskah 2019, untuk memperkuat citra sebagai rezim proteksionis yang melindungi mayoritas Sinhala dari ancaman luar dan dalam. Penelitian Imtiyaz (2023) menunjukkan bahwa negara melakukan *securitization* terhadap komunitas Muslim dengan menampilkan mereka sebagai ancaman potensial, yang mengakibatkan pengawasan ketat, pelarangan praktik budaya tertentu, serta penggunaan Undang-Undang Pencegahan Terorisme (PTA) secara diskriminatif. Kondisi ini memperdalam ketidakpercayaan minoritas terhadap negara.

Dari sisi ekonomi, pemerintahan Rajapaksa mengambil keputusan besar yang tidak berbasis data, seperti pemotongan pajak masif pada 2019 dan kebijakan *organic-only agriculture* pada 2021 yang menyebabkan keruntuhan produksi pangan nasional. Bank Dunia (2022) mencatat bahwa kebijakan pertanian organik penuh menyebabkan penurunan produksi padi hingga 20–35 persen dalam satu siklus panen, yang memperparah ketidakstabilan ekonomi. Kombinasi mismanajemen, hilangnya cadangan devisa, dan salah urus fiskal memuncak pada krisis multidimensi 2022 yang memicu protes besar-besaran Aragalaya (Gunaratne, 2026). Dengan demikian, kondisi sosial politik di bawah dinasti Rajapaksa ditandai oleh sentralisasi kekuasaan, meningkatnya otoritarianisme, polarisasi etno-religius, serta kebijakan ekonomi yang tidak efektif.

Gambar 2.2 Kelangkaan Bensin Akibat Krisis di Srilanka



Sumber: IDN Times (2023)

Analisis Martins (2022) memperlihatkan bahwa konsentrasi kekuasaan di lingkaran keluarga juga melemahkan kapasitas birokrasi, karena banyak keputusan strategis diambil secara impulsif tanpa data fiskal yang memadai. Keputusan

menghentikan impor pupuk kimia dan memaksakan transisi organik misalnya, tidak melalui proses konsultatif antarkementerian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Rajapaksa cenderung mengabaikan mekanisme teknokratis dan lebih banyak mengandalkan intuisi politik keluarga. BBC Indonesia (2022) mencatat bahwa masyarakat Sri Lanka pada masa ini mengalami penurunan drastis kualitas layanan publik, dari listrik yang sering padam hingga kelangkaan obat-obatan, yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintah runtuh.

Krisis ini tidak hanya mempertajam kritik terhadap Gotabaya, tetapi juga membuat publik menilai bahwa pola pemerintahan keluarga Rajapaksa telah mengorbankan stabilitas jangka panjang demi kepentingan politik jangka pendek. Iswara (2022) menegaskan bahwa kesalahan kebijakan ekonomi Rajapaksa tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan lemahnya transparansi fiskal dan ketiadaan akuntabilitas dalam struktur pemerintahan. Dengan minimnya pengawasan parlemen, kebijakan fiskal populis seperti pemotongan pajak besar-besaran disahkan tanpa proyeksi dampak jangka panjang, sehingga menekan pendapatan negara, memperbesar defisit, dan pada akhirnya menggiring Sri Lanka menuju kebangkrutan.

2.2 Faktor Disintegrasi Masyarakat di Sri Lanka

Disintegrasi masyarakat Sri Lanka selama krisis 2020–2022 merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor etno-politik, ekonomi, dan institusional. Salah satu faktor paling mendasar adalah warisan konflik etnis berkepanjangan antara komunitas Sinhala, Tamil, dan Muslim. Meski perang saudara berakhir pada 2009, ketegangan etnis tetap bertahan akibat tidak adanya proses rekonsiliasi menyeluruh. Orjuela (2021) menekankan bahwa negara gagal menjalankan

reformasi struktural, penyelidikan pelanggaran HAM, dan pemberdayaan komunitas minoritas, sehingga luka sosial tetap terbuka dan memicu akumulasi ketegangan sosial.

Selain faktor historis, pendekatan keamanan yang digunakan dalam era Rajapaksa memperburuk fragmentasi sosial. Penggunaan militer dalam urusan sipil, terutama di wilayah Utara dan Timur, menciptakan rasa teralienasi di kalangan masyarakat Tamil. DeVotta (2022) menulis bahwa strategi politik Rajapaksa bergantung pada penguatan identitas eksklusif Sinhala-Buddhis, yang menghasilkan ketimpangan representasi politik serta meminggirkan komunitas minoritas dari proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, komunitas Muslim mengalami stigmatisasi pasca bom Paskah melalui kebijakan pengawasan berlebihan dan pengaturan ketat aktivitas keagamaan (Haniffa 2021).

Krisis ekonomi 2022 juga menjadi pemicu utama disintegrasi sosial. Hilangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, bahan bakar, dan layanan kesehatan menyebabkan masyarakat dari berbagai kelompok kehilangan kepercayaan terhadap negara. Asian Development Bank (2022) menyebutkan bahwa krisis fiskal Sri Lanka merupakan hasil ketidakseimbangan struktur ekonomi selama bertahun-tahun, ditambah kebijakan populis dalam periode 2019–2021. Akibatnya, kepercayaan terhadap institusi negara mengalami penurunan drastis.

Gambar 2.2 Kelangkaan Bensin Akibat Krisis di Srilanka



Sumber: Iswara (2022)

Temuan BBC (2022) menguatkan bahwa warga Sri Lanka dari kelas menengah pun mengalami kerentanan baru, seperti ketidakmampuan membeli gas memasak dan antrean panjang untuk bahan bakar. Kondisi ini mempersempit ruang solidaritas tradisional karena setiap kelompok masyarakat berfokus pada kelangsungan hidup masing-masing, mempercepat proses fragmentasi sosial. Sumber MARTIN (2022) menambahkan bahwa narasi pemerintah yang cenderung menyalahkan faktor eksternal—seperti pandemi atau ekonomi global—justru memperburuk ketegangan horizontal karena gagal mengakui kesalahan internal rezim. Ketika pemerintah tidak menunjukkan tanggung jawab, masyarakat merasa negara tidak lagi menjadi penjaga kepentingan kolektif. Namun di sisi lain, Iswara (2022) mencatat bahwa krisis ini membuka ruang refleksi masyarakat terhadap kegagalan tata kelola negara. Fragmentasi sosial memang meningkat, tetapi

kekecewaan bersama terhadap rezim juga menjadi fondasi bagi solidaritas baru yang kelak berwujud dalam protes Aragalaya.

2.3 Dampak Krisis Ekonomi dan Pemerintahan terhadap Kesejahteraan Sosial dan Struktur Masyarakat

Krisis ekonomi Sri Lanka pada 2021–2022 menimbulkan guncangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan struktur masyarakat, dengan efek yang menjalar pada hampir seluruh aspek kehidupan. Salah satu pemicunya adalah kebijakan pemotongan pajak besar-besaran pada 2019 yang menyebabkan pendapatan negara turun drastis dan mempersempit ruang fiskal. Human Rights Watch (2023) mencatat bahwa langkah tersebut melemahkan kemampuan pemerintah menyediakan layanan publik mendasar, termasuk subsidi pangan, bantuan sosial, dan pengadaan kebutuhan pokok. Ketika cadangan devisa nasional runtuh dan Sri Lanka tidak mampu membayar impor bahan bakar serta obat-obatan, situasi berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang memaksa masyarakat menghadapi kekurangan energi, gangguan transportasi, dan kelangkaan barang-barang vital.

Ambruknya kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhan dasar mempercepat degradasi kesejahteraan masyarakat. Survei Sri Lanka Barometer (2023) menunjukkan bahwa krisis tersebut memicu penurunan tajam tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara—mulai dari pemerintah pusat hingga lembaga yudisial dan sektor kesehatan. Peningkatan pengangguran, kelangkaan pangan, serta merosotnya layanan kesehatan publik membuat struktur sosial yang sebelumnya relatif stabil menjadi rapuh. Komunitas yang sebelumnya mengandalkan solidaritas internal untuk bertahan dari tekanan ekonomi jangka

pendek kini menghadapi kesulitan berlapis, sehingga melemahkan fondasi kohesi sosial yang berfungsi menjaga ketahanan masyarakat dalam situasi krisis.

BBC Indonesia (2022) mengilustrasikan dampak sosial krisis ini melalui kisah nyata keluarga-keluarga Sri Lanka yang terpaksa melakukan pengorbanan ekstrem. Banyak keluarga harus mengurangi konsumsi makanan hingga di bawah standar gizi, mengeluarkan anak-anak dari sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan atau transportasi, serta menjual barang berharga demi memenuhi kebutuhan harian. Realitas ini tidak hanya menggerus kesejahteraan material, tetapi juga merusak struktur keluarga sebagai unit sosial paling dasar. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar melahirkan dinamika sosial baru, seperti meningkatnya konflik keluarga, percepatan kerja anak (*child labor*), dan hilangnya peluang pendidikan bagi generasi muda yang akan berdampak jangka panjang bagi mobilitas sosial dan pembangunan manusia.

Lebih jauh, MARTIN (2022) menyoroti bahwa krisis ekonomi tidak hanya melahirkan kelaparan dan kemiskinan, tetapi juga krisis kesehatan yang memperparah penderitaan masyarakat. Rumah sakit mengalami kekurangan obat-obatan dasar, bahan sekali pakai, bahkan listrik untuk mengoperasikan mesin. Banyak pasien kronis—seperti penderita diabetes, penyakit jantung, atau kanker—kehilangan akses terhadap pengobatan rutin yang sebelumnya dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya jumlah kematian yang sebenarnya dapat dicegah (*preventable deaths*). Ketika sistem kesehatan publik gagal berfungsi, kepercayaan masyarakat terhadap negara melemah semakin dalam, menciptakan lingkungan sosial yang penuh ketidakpastian dan kecemasan.

Iswara (2022) mencatat bahwa salah satu rekomendasi utama IMF untuk membantu Sri Lanka keluar dari kebangkrutan adalah reformasi menyeluruh terhadap sistem jaminan sosial agar kelompok rentan tetap terlindungi selama masa pemulihan ekonomi. Namun, keterbatasan fiskal membuat implementasinya berjalan lambat dan tidak merata. Sementara pemerintah berfokus pada stabilisasi makroekonomi dan renegosiasi utang, banyak warga miskin tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrem. Pada saat yang sama, kelas menengah yang sebelumnya relatif stabil terdorong jatuh ke dalam kerentanan baru akibat inflasi tinggi, hilangnya pekerjaan, dan kenaikan tajam biaya hidup. Fenomena ini menyebabkan proses *middle-class hollowing out*, yaitu penyusutan kelas menengah, yang secara sosial dan politik dapat mengancam stabilitas jangka panjang sebuah negara.

Secara keseluruhan, krisis ekonomi Sri Lanka tidak hanya mengguncang kondisi fiskal negara, tetapi juga merusak struktur-struktur sosial yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Keluarga, komunitas lokal, institusi sosial, dan layanan publik mengalami tekanan berat hingga kehilangan fungsi optimalnya. Krisis tersebut membuka kerentanan baru dalam masyarakat, memperlemah kohesi sosial, meningkatkan kecemasan kolektif, dan menimbulkan erosi kepercayaan yang mendalam terhadap pemerintah dan institusi negara. Dalam konteks jangka panjang, dampak ini dapat menghambat proses rekonsiliasi etnis, memperbesar kesenjangan sosial, dan mengancam integrasi nasional Sri Lanka apabila tidak diatasi melalui kebijakan sosial yang inklusif dan reformasi struktural yang berkelanjutan.

2.4 Dinamika Solidaritas, Protes Nasional, dan Potensi Rekonsiliasi Sosial: Peran Masyarakat Sipil

Gerakan Aragalaya menjadi simbol resistensi nasional yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat, melampaui batas etnis, agama, dan kelas sosial. United States Institute of Peace (2022) mencatat bahwa gerakan ini tidak memiliki pemimpin tunggal, tetapi terbentuk dari ketidakpuasan kolektif terhadap kegagalan pemerintah mengelola ekonomi dan tata kelola negara. Aragalaya muncul sebagai bentuk artikulasi kemarahan publik terhadap mismanajemen struktural dan akumulasi krisis, mulai dari kelangkaan bahan bakar hingga runtuhnya layanan kesehatan. Ruang-ruang publik seperti Galle Face Green berubah menjadi arena politik yang memungkinkan masyarakat menyuarakan kritik secara langsung, menuntut akuntabilitas, transparansi, dan reformasi politik yang selama ini diabaikan oleh rezim Rajapaksa.

Fenomena tersebut menandai momentum baru bagi rekonsiliasi sosial di Sri Lanka. Gamage dan Khattri (2024) menjelaskan bahwa sejak krisis 2022 terdapat upaya reformasi struktural, termasuk perbaikan kebijakan fiskal, penataan ulang kebijakan sosial, dan pembenahan kelembagaan guna mengurangi konsentrasi kekuasaan eksekutif. Meskipun hambatan politik masih besar—terutama resistensi elite lama, fragmentasi partai politik, dan keterbatasan anggaran negara—meningkatnya partisipasi publik menunjukkan bahwa masyarakat ingin mengakhiri siklus otoritarianisme yang mengakar selama lebih dari satu dekade. Perubahan ini juga membuka diskusi baru mengenai model tata kelola yang lebih inklusif, berbasis konsultasi publik, dan bertumpu pada mekanisme checks and balances yang kuat.

BBC Indonesia (2022) menunjukkan bahwa protes Aragalaya berhasil menciptakan ruang interaksi yang lebih egaliter antara kelompok etnis: Tamil, Muslim, dan Sinhala untuk pertama kalinya berdiri bersama sebagai warga negara dengan tuntutan yang sama. Ini merupakan titik balik historis dalam lanskap kohesi sosial Sri Lanka, karena ruang solidaritas lintas-identitas sebelumnya hampir tidak pernah terbentuk akibat warisan panjang konflik etnis dan polarisasi politik. Dalam konteks ini, Aragalaya bukan hanya gerakan politik tetapi juga proses sosial yang meruntuhkan tembok segregasi etno-religius dan membuka ruang dialog antar-komunitas yang selama ini terhambat.

Gambar 2.3 Protes Anti Pemerintah Di Srilanka 2022



Sumber: Johansson (2022)

MARTIN (2022) menyebutkan bahwa keberhasilan gerakan ini menggulingkan Gotabaya Rajapaksa membuka wacana baru mengenai peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi Sri Lanka. Energi kolektif yang ditunjukkan oleh demonstran—yang mayoritas berasal dari kelas menengah urban dan generasi muda—menggambarkan kebangkitan kesadaran politik yang lebih

kritis dan reflektif. Keterlibatan generasi muda dalam protes juga mengindikasikan perubahan paradigma politik: dari politik identitas yang eksklusif menuju politik kinerja dan akuntabilitas. Dengan demikian, Aragalaya mendorong revitalisasi masyarakat sipil sebagai aktor penting dalam menyeimbangkan kekuatan politik negara.

Iswara (2022) menegaskan bahwa reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF menuntut peningkatan transparansi fiskal dan penguatan institusi pengawasan publik. Tekanan dari jalanan selama gerakan Aragalaya berfungsi sebagai katalis yang mendorong pemerintah menerima syarat tersebut, meskipun terdapat risiko resistensi politik dari kelompok yang diuntungkan oleh struktur lama. Reformasi fiskal, termasuk modernisasi sistem perpajakan dan pengurangan subsidi yang tidak efisien, diproyeksikan membuka jalan bagi tata kelola yang lebih terbuka—sebuah prasyarat penting bagi rekonsiliasi jangka panjang. Dengan adanya tuntutan publik yang kuat untuk tata kelola yang bersih, Sri Lanka berpotensi keluar dari siklus patronase dan korupsi yang selama ini melemahkan fondasi negara.

Lebih jauh lagi, Aragalaya memberi contoh bahwa solidaritas yang dibangun secara organik dapat mengubah konfigurasi kekuatan politik nasional. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif dalam menyikapi krisis, tetapi mampu mengartikulasikan tuntutan kolektif melalui aksi damai, produksi pengetahuan alternatif, dan mobilisasi digital. Para pengamat menilai bahwa Aragalaya telah menciptakan budaya baru dalam politik Sri Lanka—budaya partisipatif yang mengutamakan dialog, kolaborasi lintas identitas, dan pengawasan publik terhadap pemerintah. Dinamika ini menimbulkan harapan bahwa struktur sosial-politik Sri Lanka dapat bergerak menuju model yang lebih inklusif, di mana

masyarakat sipil memiliki ruang yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan dan dalam memastikan keberlanjutan reformasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, protes Aragalaya bukan hanya reaksi spontan terhadap krisis ekonomi, tetapi juga representasi dari keresahan historis dan keinginan rakyat atas perubahan mendasar dalam struktur negara. Dengan keterlibatan lintas etnis, dorongan terhadap reformasi, dan munculnya energi kolektif masyarakat sipil, gerakan ini dapat dilihat sebagai fondasi baru bagi rekonsiliasi sosial dan demokratisasi Sri Lanka. Jika momentum ini dapat dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan publik, Aragalaya berpotensi menjadi titik balik penting dalam perjalanan Sri Lanka menuju negara yang lebih adil, inklusif, dan berketahanan sosial tinggi.

2.5 Kesenjangan Geografis dan Ketidakmerataan Dampak Krisis: Perbedaan Urban–Rural dan Komunitas Minoritas

Dampak krisis Sri Lanka tidak dialami secara merata dan memperburuk ketimpangan berbasis wilayah dan kelas sosial. Laporan Asia Maior (2024) menegaskan bahwa perbedaan akses terhadap pangan, bahan bakar, dan layanan publik menjadi semakin mencolok antara wilayah urban dan rural. Komunitas pedesaan, terutama sektor pertanian dan perkebunan (estate sector), mengalami kerentanan ekstrem akibat kebijakan pelarangan pupuk kimia pada 2021. Penurunan produksi padi dan teh mencapai 20–30 persen dalam satu musim, memicu penurunan pendapatan petani serta penghentian kegiatan ekonomi di banyak wilayah agraris. Kejatuhan produksi tersebut tidak hanya memengaruhi ketahanan pangan lokal, tetapi juga menekan cadangan devisa negara karena ekspor komoditas utama merosot tajam.

Sementara itu, komunitas urban menghadapi tekanan dengan karakter berbeda. Lonjakan harga pangan, antrean bahan bakar yang berlangsung berhari-hari, serta kelumpuhan transportasi publik membuat kehidupan sehari-hari menjadi sangat sulit. Survei Tonkov (2023) menunjukkan bahwa masyarakat urban mengalami peningkatan stres ekonomi yang signifikan karena bergantung pada akses energi, mobilitas, dan pendapatan upah harian. Meski akses informasi dan jaringan sosial lebih kuat, kerentanan mereka justru tinggi karena aktivitas ekonomi kota sangat sensitif terhadap disrupsi pasokan energi dan transportasi.

Gambar 2.4 Antrian Bahan Bakar di Kolombo, Sri Lanka, 07 Juni 2022.



Sumber: Wulandhari (2022)

MARTIN (2022) menambahkan bahwa kota-kota besar seperti Colombo mengalami bentuk kerentanan berbeda. Ketergantungan tinggi pada infrastruktur modern—listrik, air, gas, rumah sakit, dan transportasi—membuat masyarakat urban merasakan disrupsi yang lebih akut. Pemadaman listrik berkepanjangan dan kelangkaan obat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama kelompok

rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pasien dengan penyakit kronis. Iswara (2022) menyoroti bahwa pemulihan Sri Lanka harus mempertimbangkan perbedaan geografis dan tingkat kerentanan antarwilayah. IMF menekankan bahwa reformasi ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada stabilisasi makro, tetapi harus mencakup program penanggulangan kemiskinan yang berbasis wilayah. Tanpa pemulihan sektor pertanian, subsidi pupuk yang terukur, perbaikan rantai pasok pedesaan, serta revitalisasi sektor maritim, pemulihan nasional berisiko menciptakan bentuk ketidaksetaraan baru. Dengan demikian, memahami ketimpangan geografis merupakan elemen penting dalam membangun kembali kohesi sosial dan ketahanan masyarakat Sri Lanka pasca-krisis.

2.6 Aktor dan Stakeholder dalam Dinamika Krisis Sri Lanka

Dinamika krisis sosial, politik, dan ekonomi di Sri Lanka tidak terlepas dari peran berbagai aktor yang terlibat sebagai stakeholder, baik sebelum maupun setelah krisis 2020–2022. Identifikasi aktor ini penting untuk memahami bagaimana interaksi antar pihak memengaruhi melemahnya maupun pemulihan kohesi social.

Aktor Sebelum Krisis (Pra-2020–2022)

Pada periode sebelum krisis, aktor utama didominasi oleh negara, khususnya pemerintahan dinasti Rajapaksa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa berperan sebagai pengambil kebijakan utama dalam bidang ekonomi dan politik. Namun, konsentrasi kekuasaan yang tinggi serta lemahnya mekanisme

checks and balances menyebabkan kebijakan publik cenderung tidak partisipatif dan minim akuntabilitas (DeVotta 2022).

Selain negara, elit politik dan militer juga menjadi aktor penting dalam proses pengambilan keputusan. Dominasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga Rajapaksa memperkuat pola *familial authoritarianism* yang membatasi ruang partisipasi publik (Uyangoda 2021).

Dalam konteks sosial, kelompok mayoritas Sinhala-Buddhis berperan sebagai basis legitimasi politik pemerintah, yang berdampak pada marginalisasi kelompok minoritas seperti Tamil dan Muslim (Imtiyaz 2023). Kondisi ini memperkuat polarisasi identitas dan memperlemah kohesi sosial.

Di sisi lain, masyarakat sipil pada periode ini memiliki ruang yang terbatas dalam memengaruhi kebijakan negara, terutama akibat pendekatan keamanan dan meningkatnya kontrol terhadap ruang publik (International Crisis Group 2021).

Aktor Setelah Krisis (Pasca-2022)

Pasca-krisis 2022, konfigurasi aktor mengalami perubahan signifikan. Pemerintahan di bawah Presiden Ranil Wickremesinghe menjadi aktor utama dalam proses pemulihan, dengan fokus pada stabilisasi ekonomi, reformasi fiskal, dan kerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF (International Monetary Fund 2023).

Selain negara, masyarakat sipil muncul sebagai aktor yang semakin dominan, terutama melalui gerakan Aragalaya yang menunjukkan meningkatnya partisipasi

publik dalam proses politik serta kemampuan masyarakat dalam mendorong perubahan melalui aksi kolektif (International Crisis Group 2023).

Aktor internasional juga memainkan peran penting dalam fase pemulihan, khususnya IMF dan World Bank yang memberikan dukungan finansial sekaligus mendorong reformasi struktural di Sri Lanka (World Bank 2023). Keterlibatan aktor eksternal ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca-krisis tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika global.

Dengan demikian, dinamika stakeholder di Sri Lanka menunjukkan pergeseran dari dominasi negara yang sentralistik menuju interaksi yang lebih kompleks antara negara, masyarakat sipil, dan aktor internasional dalam proses pemulihan kohesi sosial.

BAB 3

IMPLEMENTASI STRATEGI SRI LANKA DALAM MEMBANGUN KEMBALI KOHESI SOSIAL PASCA KRISIS

Bab ini membahas implementasi strategi Sri Lanka dalam membangun kembali kohesi sosial pasca-krisis ekonomi dan politik 2020–2022. Analisis diarahkan pada pemahaman mengenai faktor-faktor yang melemahkan kohesi sosial, langkah pemerintah dalam memperkuat *inclusive identity*, membangun

kembali kepercayaan (trust) antara negara dan masyarakat, serta mendorong kerja sama untuk kepentingan bersama (*cooperation for the common good*). Selain strategi pemerintah, bab ini juga mengevaluasi keterlibatan organisasi internasional, peran masyarakat sipil, dan inisiatif rekonsiliasi sosial yang berkembang pasca-krisis besar tersebut.

3.1 Peran Pemerintah dalam Membentuk Kohesi Sosial

Peran pemerintah merupakan faktor kunci dalam membentuk dan memperkuat kohesi sosial, khususnya dalam konteks negara yang mengalami krisis multidimensi seperti Sri Lanka. Dalam perspektif kohesi sosial, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola kebijakan publik, tetapi juga sebagai aktor utama yang menentukan arah integrasi sosial melalui kebijakan yang inklusif, distribusi sumber daya yang adil, serta pembangunan kepercayaan antara masyarakat dan institusi negara. Kohesi sosial yang kuat sangat bergantung pada kapasitas negara dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup secara harmonis, saling percaya, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Leininger et al., 2021).

Salah satu peran utama pemerintah dalam membentuk kohesi sosial adalah melalui penyediaan kebijakan sosial dan ekonomi yang inklusif. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, maupun kelas sosial, memiliki akses yang setara terhadap layanan publik dan perlindungan sosial. Burchi et al. (2022) menegaskan bahwa kapasitas negara dalam menyediakan perlindungan sosial secara merata dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan institusi negara, sekaligus meningkatkan legitimasi pemerintah, terutama dalam situasi krisis.

Dalam konteks Sri Lanka, kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar selama krisis 2022 justru mempercepat penurunan kepercayaan publik dan memperlemah kohesi sosial.

Selain itu, pemerintah juga berperan penting dalam membentuk identitas kolektif yang inklusif (*inclusive identity*). Dalam masyarakat multietnis seperti Sri Lanka, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola keberagaman secara adil dan tidak diskriminatif. Kebijakan yang cenderung eksklusif, seperti yang terjadi pada era dominasi nasionalisme Sinhala-Buddhis, terbukti memperkuat polarisasi sosial dan memperlemah integrasi nasional. Sebaliknya, pemerintah yang mampu mempromosikan identitas kebangsaan yang inklusif akan mendorong rasa memiliki (*sense of belonging*) di antara berbagai kelompok masyarakat, yang merupakan fondasi penting bagi kohesi sosial (Arant, Larsen, & Boehnke, 2021).

Peran pemerintah selanjutnya adalah dalam membangun dan memulihkan kepercayaan (*trust*), baik secara vertikal antara masyarakat dan negara maupun secara horizontal antarwarga. Kepercayaan terhadap institusi negara sangat dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik. Dalam kasus Sri Lanka, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah selama krisis disebabkan oleh mismanajemen ekonomi, lemahnya tata kelola, serta kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa kepercayaan, negara akan kesulitan membangun kerja sama sosial yang diperlukan untuk pemulihan pascakrisis (DeVotta, 2022).

3.2 Strategi Pemerintah dalam Memperkuat *Inclusive Identity*

Konsep inclusive identity menurut Leininger et al. (2021) merujuk pada sejauh mana individu dalam suatu masyarakat merasa menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas tanpa adanya eksklusi berbasis identitas tertentu seperti etnis, agama, atau kelompok sosial. Inclusive identity mencakup beberapa aspek utama, yaitu adanya rasa memiliki (sense of belonging) terhadap negara atau komunitas, penerimaan terhadap keberagaman (acceptance of diversity), serta pengakuan kesetaraan status sosial antar kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, identitas yang inklusif tidak hanya menekankan kesamaan, tetapi juga mengakomodasi perbedaan secara setara dalam kerangka kebangsaan yang sama, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat kohesi sosial (Leininger et al. 2021).

Strategi pertama pemerintah dalam memperkuat inclusive identity adalah reformasi kebijakan kesejahteraan berbasis non-diskriminasi. Dalam kerja sama dengan IMF, pemerintah Sri Lanka diwajibkan mereformasi sistem jaminan sosial agar bantuan publik tidak lagi didistribusikan berdasarkan loyalitas politik atau identitas etnis, melainkan berdasarkan tingkat kerentanan sosial-ekonomi. Iswara (2022) mencatat bahwa skema bantuan pasca-krisis difokuskan pada targeting rumah tangga miskin lintas wilayah, termasuk Provinsi Utara dan Timur yang mayoritas dihuni komunitas Tamil. Dampak dari strategi ini terlihat pada meningkatnya persepsi keadilan distribusi bantuan, yang menurut survei pasca-krisis berkontribusi pada menurunnya keluhan diskriminasi etnis dalam akses bantuan dasar. Dengan kata lain, kebijakan kesejahteraan yang inklusif berfungsi sebagai instrumen simbolik dan material untuk menegaskan bahwa negara hadir bagi seluruh warga tanpa pembedaan identitas.

Strategi kedua adalah perluasan partisipasi politik dan konsultasi kebijakan lintas kelompok sosial. Tekanan publik melalui gerakan Aragalaya memaksa pemerintah mengubah pendekatan top-down yang sebelumnya tertutup menjadi lebih partisipatif. Martin (2022) melaporkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan ekonomi pasca-krisis, pemerintah mulai melibatkan perwakilan serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta tokoh komunitas minoritas. Meskipun keterlibatan ini masih bersifat konsultatif dan belum sepenuhnya institusional, perubahan tersebut menandai pergeseran penting dari politik eksklusiver menuju tata kelola yang lebih inklusif. Dampaknya terhadap kohesi sosial terlihat pada meningkatnya rasa political inclusion, khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat urban, yang sebelumnya merasa teralienasi dari proses pengambilan keputusan negara.

Dalam konteks pemulihan pasca-krisis, pemerintahan Presiden Ranil Wickremesinghe juga mulai mendorong stabilitas politik melalui pendekatan rekonsiliasi dan reformasi institusional. Selain fokus pada pemulihan ekonomi, pemerintah menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah meningkatnya ketegangan sosial pasca-krisis. Upaya ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial dan penguatan identitas kolektif menjadi bagian penting dalam proses pemulihan Sri Lanka (IMF 2023).

Strategi ketiga pemerintah adalah revitalisasi agenda rekonsiliasi dan transitional justice yang sempat terhenti. Laporan MPTF-UNDP (2018) menunjukkan bahwa penyelesaian warisan konflik—seperti isu tahanan politik Tamil, penghilangan paksa, dan marginalisasi wilayah Utara dan Timur—merupakan prasyarat bagi terbentuknya identitas nasional yang inklusif. Pasca-

krisis, pemerintah kembali mengaktifkan forum dialog antar-komunitas, memperluas kewenangan pemerintahan lokal, serta meningkatkan alokasi layanan publik di wilayah pasca-konflik. Meskipun implementasinya masih menghadapi resistensi politik, langkah ini memiliki dampak simbolik yang signifikan: negara mulai mengakui luka historis kelompok minoritas sebagai bagian dari narasi nasional, bukan sebagai ancaman terhadap persatuan.

Strategi keempat adalah pemerataan layanan publik dan pembangunan berbasis wilayah (*spatial inclusion*). Pemerintah menyadari bahwa ketimpangan geografis telah lama memperkuat rasa keterasingan kelompok minoritas dari negara. Oleh karena itu, pasca-krisis, kebijakan pemulihan difokuskan pada peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar di wilayah non-urban. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi UNDP bahwa pemerataan layanan dasar merupakan fondasi pembentukan *sense of belonging* terhadap negara. Dampaknya terhadap kohesi sosial terlihat dalam meningkatnya interaksi sosial lintas etnis melalui sekolah, fasilitas kesehatan, dan proyek infrastruktur bersama, yang secara perlahan mengikis segregasi sosial berbasis wilayah.

Strategi kelima yang tidak kalah penting adalah perubahan retorika dan simbolisme politik negara. Setelah kejatuhan Gotabaya Rajapaksa, pemerintah mulai meninggalkan narasi sektarian yang menekankan superioritas kelompok mayoritas, dan menggantinya dengan narasi *collective recovery*—bahwa seluruh warga Sri Lanka adalah korban krisis dan memiliki kepentingan bersama untuk bangkit. Pergeseran retorika ini tercermin dalam pidato resmi pemerintah, komunikasi publik, serta pesan-pesan kebijakan yang menekankan persatuan

nasional berbasis penderitaan dan tujuan bersama. Dampak dari strategi simbolik ini adalah terciptanya ruang diskursif baru bagi identitas kebangsaan yang lebih inklusif, di mana perbedaan etnis tidak lagi menjadi pusat narasi politik.

Secara keseluruhan, strategi pemerintah Sri Lanka dalam memperkuat inclusive identity pasca-krisis meliputi reformasi kesejahteraan non-diskriminatif, perluasan partisipasi politik, revitalisasi rekonsiliasi pasca-konflik, pemerataan layanan publik, serta perubahan retorika nasional. Dampak kumulatif dari strategi-strategi ini terlihat pada berkurangnya fragmentasi sosial, meningkatnya rasa keadilan distributif, serta tumbuhnya kembali identitas kolektif berbasis kepentingan bersama. Dengan demikian, inclusive identity tidak hanya diposisikan sebagai ideal normatif, tetapi sebagai strategi kebijakan konkret untuk memulihkan dan memperkuat kohesi sosial Sri Lanka pasca-krisis multidimensi 2022.

Upaya memperkuat inclusive identity dilakukan melalui rekonsiliasi antar-komunitas dan munculnya solidaritas lintas etnis pasca-krisis. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran menuju identitas kolektif yang lebih inklusif sebagai fondasi kohesi sosial.

3.3 Membangun Kembali Kepercayaan (Trust) antara Negara dan Masyarakat

Trust dalam kerangka kohesi sosial menurut Leininger et al. (2021) merujuk pada tingkat kepercayaan yang berkembang baik di antara individu dalam masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi negara, yang berperan sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya kerja sama sosial. Dalam kerangka ini, *trust* terdiri atas dua dimensi utama, yaitu *horizontal trust* dan *vertical trust*. *Horizontal trust* berkaitan dengan kepercayaan antarindividu atau antar kelompok sosial yang memungkinkan terbentuknya solidaritas, rasa aman, serta kemampuan

untuk berkolaborasi lintas perbedaan identitas. Sementara itu, *vertical trust* mengacu pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan sistem formal, yang dipengaruhi oleh tingkat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas kinerja pemerintah. Kedua dimensi tersebut memiliki hubungan yang saling memengaruhi, di mana rendahnya kepercayaan terhadap negara dapat berdampak pada melemahnya relasi sosial antarwarga, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, *trust* tidak hanya berfungsi sebagai indikator kohesi sosial, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam menopang stabilitas sosial dan legitimasi negara (Leininger et al. 2021).

Krisis ekonomi Sri Lanka yang mencapai puncaknya pada tahun 2022 memicu runtuhnya kepercayaan publik terhadap negara dan institusi pemerintahan. Masyarakat menghadapi kesulitan mengakses bahan bakar, listrik, pangan, obat-obatan, dan layanan publik dasar. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa negara gagal memenuhi mandat sosialnya. Untuk memulihkan kembali kepercayaan tersebut, pemerintah Sri Lanka bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Asian Development Bank (ADB) guna menstabilkan ekonomi, memperbaiki sistem fiskal, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Menurut Iswara (2022), rangkaian reformasi IMF mensyaratkan publikasi laporan fiskal secara berkala, pengendalian belanja negara, reformasi perpajakan, serta deregulasi berbagai sektor ekonomi agar efisiensi dan akuntabilitas dapat meningkat secara signifikan.

Selain reformasi struktural di tingkat fiskal, pemerintah juga memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial yang sebelumnya dinilai tidak transparan dan sarat

praktik korupsi. Wulandhari (2022) melaporkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran khusus senilai USD 4,6 miliar—atau sekitar Rp72 triliun—untuk pengadaan pangan, energi, dan obat-obatan yang disalurkan melalui skema jaminan sosial berbasis identifikasi keluarga miskin. Pembaruan data sosial-ekonomi ini bertujuan menekan kebocoran anggaran serta memastikan kelompok rentan, termasuk masyarakat pedesaan, pekerja harian, dan keluarga berpendapatan rendah, memperoleh bantuan tepat waktu. Perbaikan sistem distribusi bantuan merupakan langkah penting untuk membangun kembali keyakinan masyarakat bahwa negara hadir secara nyata dalam mengatasi penderitaan mereka.

Setelah menjabat sebagai presiden pada 2022, Ranil Wickremesinghe memfokuskan kebijakan pemerintah pada stabilisasi ekonomi melalui kerja sama dengan IMF, restrukturisasi utang, dan reformasi fiskal. Pemerintahannya menilai bahwa pemulihan ekonomi merupakan langkah utama untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara setelah krisis multidimensi yang terjadi pada 2022 (International Monetary Fund 2023).

Pendekatan pemulihan kepercayaan juga dilakukan melalui penciptaan peluang ekonomi lokal. Laporan International Labour Organization (ILO, 2023) mengenai Local Economic Development and Post-Conflict Recovery menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja berbasis komunitas merupakan komponen fundamental dalam memulihkan trust antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Sri Lanka menerapkan rekomendasi tersebut dengan mengembangkan program ekonomi desa, seperti revitalisasi UMKM, pengembangan home gardening untuk ketahanan pangan rumah tangga, serta penyediaan insentif untuk usaha kecil berbasis pertanian dan komoditas lokal. Kehadiran negara dalam bentuk

fasilitasi ekonomi di tingkat mikro menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya mengembalikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat ke arah stabil.

Upaya membangun kembali kepercayaan juga dilakukan melalui reformasi hukum, peningkatan transparansi politik, serta mekanisme konsultasi publik yang lebih terbuka. Martin (2022) menegaskan bahwa setelah pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa, pemerintah transisi mulai melibatkan aktor masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi profesional dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Meski ruang partisipasi tersebut masih terbatas, perubahan ini diterima sebagai langkah awal menuju pemerintahan yang lebih responsif dan demokratis. Konsultasi publik dalam perumusan kebijakan merupakan elemen penting karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan negara.

Kepercayaan juga dibangun melalui penguatan komunikasi publik pemerintah. Selama krisis, masyarakat Sri Lanka mengalami ketidakpastian informasi akibat minimnya transparansi pemerintah sebelumnya. Menurut Martin (2022), pemerintah transisi berupaya memperbaiki pola komunikasi melalui rilis data ekonomi yang lebih terstruktur, penyampaian informasi distribusi bantuan secara terbuka, serta dialog rutin dengan media dan LSM. Komunikasi yang konsisten ini membantu mengurangi rumor, kepanikan, serta meningkatkan persepsi masyarakat bahwa negara bergerak secara terukur dan bertanggung jawab dalam mengelola krisis.

Selain perbaikan tata kelola, trust juga dibangun melalui kerja sama internasional yang lebih luas. Iswara (2022) mengungkapkan bahwa pemerintah Sri Lanka membuka diri untuk kolaborasi dengan negara donor, termasuk India,

Jepang, dan Uni Eropa, guna memperoleh dukungan keuangan dan teknis. Keterbukaan ini tidak hanya penting untuk pemulihan ekonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat yang sebelumnya menganggap pemerintah tertutup dan tidak mau menerima bantuan global. Kerja sama internasional menjadi bukti bahwa pemerintah bersedia mengakui keterbatasannya dan mengambil langkah realistis demi pemulihan nasional.

Selain langkah struktural dan eksternal, trust dibangun melalui rekonstruksi hubungan negara–masyarakat di tingkat komunitas. Laporan UNDP (MPTF-UNDP, 2018) menekankan pentingnya pendekatan berbasis rekonsiliasi sosial untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pemerintah dan kelompok minoritas, terutama Tamil dan Muslim, yang selama bertahun-tahun merasa terpinggirkan. Pasca-krisis 2022, pemerintah mulai menghidupkan kembali program transitional justice, dialog antar komunitas, serta penyelesaian kasus penghilangan paksa dan tahanan politik. Upaya ini memperluas ruang bagi negara untuk menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial, sehingga menjadi fondasi penting dalam pembangunan trust jangka panjang. Dengan demikian, strategi membangun kembali kepercayaan antara negara dan masyarakat Sri Lanka pasca-krisis melibatkan kombinasi kebijakan fiskal, transparansi politik, penguatan ekonomi lokal, komunikasi publik, serta rekonsiliasi sosial. Seluruh langkah ini menunjukkan bahwa pemulihan trust tidak hanya bergantung pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada kemampuan negara membangun hubungan baru yang lebih responsif, inklusif, dan akuntabel.

Selain kebijakan makro dan reformasi institusional, pemerintah Sri Lanka juga mengambil langkah konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat

sehari-hari. Salah satu kebijakan paling signifikan adalah reintroduksi subsidi energi dan listrik secara bertahap pada akhir 2022 hingga 2023 setelah stabilisasi pasokan. BBC Indonesia (2022) melaporkan bahwa pemerintah memprioritaskan distribusi bahan bakar untuk transportasi publik, rumah sakit, dan sektor pangan guna memastikan mobilitas masyarakat dan layanan dasar dapat kembali berjalan. Kebijakan ini berdampak langsung pada penurunan antrean BBM yang sebelumnya menjadi simbol kegagalan negara, serta membantu meredakan ketegangan sosial di wilayah urban dan rural. Normalisasi distribusi energi tidak hanya memulihkan aktivitas ekonomi, tetapi juga mengurangi potensi konflik horizontal akibat kelangkaan sumber daya.

Langkah konkret lainnya adalah digitalisasi dan reformasi sistem bantuan sosial, yang diperkuat melalui basis data penerima manfaat nasional. Menurut laporan Iswara (2022), pemerintah Sri Lanka mulai menerapkan mekanisme verifikasi penerima bantuan berbasis household targeting untuk menghindari tumpang tindih dan praktik patronase politik yang sebelumnya merusak kepercayaan publik. Reformasi ini memungkinkan bantuan pangan dan tunai menjangkau kelompok paling rentan, termasuk pekerja informal dan rumah tangga miskin di wilayah konflik lama seperti Provinsi Utara dan Timur. Transparansi dalam penyaluran bantuan berkontribusi pada meningkatnya persepsi keadilan distribusi, yang merupakan elemen kunci dalam pemulihan trust dan kohesi sosial (World Bank, 2018; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017).

Di sisi sektor swasta, perusahaan-perusahaan besar dan menengah di Sri Lanka juga berperan aktif dalam mendukung pemulihan sosial pasca-krisis melalui

inisiatif corporate social responsibility (CSR) yang bersifat responsif terhadap krisis. Martin (2022) mencatat bahwa sejumlah perusahaan energi dan logistik nasional terlibat dalam program distribusi pangan murah, bantuan transportasi bagi pekerja esensial, serta dukungan logistik untuk rumah sakit dan sekolah. Inisiatif ini membantu menutup kesenjangan sementara antara kapasitas negara dan kebutuhan masyarakat, sekaligus membangun persepsi bahwa pemulihan nasional merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor.

Selain itu, sektor perbankan dan keuangan turut mengambil langkah adaptif dengan memberikan restrukturisasi kredit dan moratorium pinjaman bagi UMKM dan rumah tangga terdampak krisis. Menurut laporan Reuters yang dikutip oleh Ghoshal (2022), beberapa bank domestik menawarkan skema penundaan pembayaran pinjaman untuk sektor usaha kecil dan petani guna mencegah kebangkrutan massal. Kebijakan ini berkontribusi pada stabilitas sosial karena mengurangi tekanan ekonomi langsung terhadap kelompok produktif, sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian lokal yang menjadi fondasi kohesi sosial di tingkat komunitas.

Peran sektor swasta juga terlihat dalam kemitraan publik–swasta (public–private partnership) untuk pemulihan ketahanan pangan. BBC Indonesia (2022) melaporkan bahwa perusahaan agribisnis bekerja sama dengan pemerintah dan LSM lokal untuk mendistribusikan benih, pupuk alternatif, dan pelatihan pertanian berkelanjutan pasca-kebijakan larangan pupuk kimia. Kolaborasi ini membantu memulihkan produksi pangan domestik sekaligus mendorong kerja sama lintas komunitas petani Sinhala, Tamil, dan Muslim, sehingga berkontribusi pada penguatan kohesi sosial berbasis kepentingan ekonomi bersama.

Di bawah pemerintahan Wickremesinghe, Sri Lanka mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi ekonomi seperti menurunnya inflasi, meningkatnya cadangan devisa, dan berkurangnya kelangkaan bahan bakar. Meskipun kebijakan austerity menuai kritik dari sebagian masyarakat, pemerintah tetap menekankan pentingnya reformasi jangka panjang untuk memulihkan stabilitas negara dan kepercayaan publik (Reuters 2024).

Secara keseluruhan, langkah-langkah konkret pemerintah dan sektor swasta ini menunjukkan bahwa pemulihan trust dan kohesi sosial di Sri Lanka tidak terjadi secara abstrak, melainkan melalui kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Normalisasi pasokan energi, reformasi bantuan sosial, keterlibatan sektor swasta dalam CSR dan perlindungan UMKM, serta kemitraan ketahanan pangan berkontribusi pada menurunnya ketegangan sosial dan meningkatnya persepsi keadilan. Dengan demikian, kerja sama lintas aktor pasca-krisis tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga membentuk kembali relasi negara–masyarakat menuju pola yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Pemulihan trust dilakukan melalui reformasi kebijakan, transparansi fiskal, dan tekanan dari masyarakat sipil. Langkah ini bertujuan membangun kembali kepercayaan antara negara dan masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal.

3.4 Peran Masyarakat Sipil, Aragalaya, dan Organisasi Internasional dalam Pemulihan Kohesi Sosial

Dalam kerangka kohesi sosial menurut Leininger et al. (2021), peran masyarakat tidak dipahami sebagai kategori aktor yang berdiri sendiri, melainkan tercermin terutama dalam dimensi *horizontal trust* dan *cooperation for the common*

good. Horizontal trust merujuk pada tingkat kepercayaan antarindividu dan antar kelompok dalam masyarakat, yang memungkinkan terbentuknya solidaritas sosial, rasa aman, serta kemampuan untuk bekerja sama lintas identitas. Dalam konteks ini, masyarakat yang kohesif ditandai oleh adanya interaksi sosial yang dilandasi saling percaya, bukan kecurigaan atau eksklusif. Selain itu, peran masyarakat juga tercermin dalam dimensi *cooperation*, yaitu kesediaan individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif demi kepentingan bersama. Dengan demikian, yang dimaksud “masyarakat” dalam kerangka Leininger bukan hanya sekadar kumpulan individu, tetapi jaringan relasi sosial yang ditopang oleh kepercayaan horizontal dan diwujudkan melalui kerja sama sosial, sehingga menjadi elemen penting dalam pemulihan kohesi sosial (Leininger et al. 2021).

Masyarakat sipil berperan dalam memperkuat trust dan cooperation. Gerakan Aragalaya mendorong akuntabilitas pemerintah sekaligus membangun solidaritas lintas kelompok melalui aksi kolektif. Protes Aragalaya 2022 menjadi tonggak penting dalam proses rekonsiliasi sosial Sri Lanka. Gerakan ini mempertemukan masyarakat lintas kelas, etnis, dan agama dalam menuntut perubahan sistemik berupa akuntabilitas politik, kebijakan ekonomi yang adil, dan penghentian praktik otoritarianisme. BBC Indonesia (2022) mencatat bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Sri Lanka, kelompok Sinhala, Tamil, dan Muslim berdiri bersama dalam demonstrasi besar dengan tuntutan serupa: perbaikan ekonomi dan pemerintahan yang transparan. Kesatuan ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi telah menjadi pengalaman bersama yang melampaui batas identitas dan menjadi dasar pembentukan solidaritas baru.

Gerakan Aragalaya juga mendorong perubahan struktur kekuasaan nasional. Martin (2022) mencatat bahwa keberhasilan Aragalaya menggulingkan Presiden Gotabaya Rajapaksa bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga simbol kebangkitan masyarakat sipil sebagai aktor penting dalam demokratisasi Sri Lanka. Setelah jatuhnya rezim Rajapaksa, masyarakat sipil memperluas ruang partisipasi dengan membentuk forum warga, kelompok advokasi, dan koalisi lintas agama yang berfokus pada reformasi konstitusi, transparansi fiskal, serta pemulihan ekonomi berbasis hak. Aktivisme ini menandai pergeseran signifikan dari politik identitas menuju politik partisipatif.

Meskipun pemerintahan Ranil Wickremesinghe berupaya menjaga stabilitas politik dan ekonomi, hubungan antara negara dan masyarakat sipil tetap menghadapi tantangan. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkritik pendekatan represif pemerintah terhadap demonstrasi pasca-Aragalaya, yang dinilai dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara (The Guardian 2022).

Program-program tersebut tidak hanya memperbaiki hubungan antar etnis, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah lokal dalam memberikan layanan yang inklusif. Sementara itu, ILO (2023) melalui kerangka *Local Economic Development* berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan pemulihan usaha kecil—keduanya merupakan faktor kunci untuk mencegah ketegangan sosial berulang di wilayah pedesaan dan pascakonflik.

Gambar 3.2 Presiden Sri Lanka di acara Hari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-56



Sumber: Antara News (2023)

Selain tiga aktor utama tersebut, berbagai lembaga kemanusiaan seperti World Food Programme, UNICEF, dan organisasi keagamaan turut memperkuat ketahanan sosial di tingkat komunitas. Bantuan pangan, pemulihan layanan pendidikan, dan program dukungan psikososial membantu memulihkan struktur sosial yang runtuh akibat krisis. Intervensi ini sangat penting mengingat kelompok paling rentan—anak-anak, perempuan kepala keluarga, dan komunitas minoritas di wilayah Utara dan Timur—mengalami dampak berlapis selama krisis. Kolaborasi antara lembaga internasional dan masyarakat sipil lokal menciptakan ruang aman bagi komunitas yang sebelumnya terpinggirkan.

Lebih jauh lagi, Aragalaya membawa dinamika baru dalam hubungan negara–masyarakat. Pemerintah transisi mulai membuka mekanisme konsultasi publik, khususnya dalam reformasi fiskal dan kebijakan subsidi. Martin (2022)

menegaskan bahwa meskipun masih terbatas, langkah ini memperbaiki persepsi publik dan menjadi fondasi awal untuk membangun kembali *trust*. Masyarakat sipil memanfaatkan momentum ini untuk mendorong reformasi lebih komprehensif, termasuk penguatan komisi independen, pembatasan kekuasaan eksekutif, dan reformasi sektor keamanan.

Kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, komunitas lokal, sektor swasta, dan organisasi internasional menjadi elemen penting dalam pemulihan kohesi sosial. Kolaborasi ini terlihat dalam program ekonomi berbasis desa, peningkatan ketahanan pangan, serta penguatan UMKM yang mendapat dukungan dari ILO (2023). Model ini terbukti efektif meningkatkan stabilitas sosial pascakonflik dengan menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang. Pada saat bersamaan, upaya rekonstruksi sosial juga diperkuat melalui program pendidikan kewarganegaraan, pelatihan resolusi konflik, dan forum dialog lintas agama untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan inklusif.

Negara-negara mitra turut memainkan peran kunci dalam menopang keberlanjutan pemulihan sosial. Seperti dijelaskan oleh Panduwawala (2022), India memberikan bantuan lebih dari USD 4 miliar sebagai dukungan bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Bantuan ini tidak hanya memperbaiki kondisi kemanusiaan, tetapi juga meredakan potensi ketegangan sosial akibat kelangkaan pangan dan energi. Dukungan dari Jepang, Cina, dan Uni Eropa memperkuat ruang fiskal Sri Lanka untuk melaksanakan reformasi sosial dan ekonomi. Ketika dikombinasikan dengan energi kolektif masyarakat sipil pasca-Aragalaya, kerja sama internasional ini membuka jalan bagi Sri Lanka untuk membangun tatanan sosial baru yang lebih inklusif, stabil, dan tahan krisis.

3.5 Kerja Sama untuk Kepentingan Bersama (*Cooperation for the Common Good*)

Menurut Leininger (2021), *cooperation for the common good* merupakan dimensi kohesi sosial yang merujuk pada kesediaan individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai kepentingan bersama, meskipun terdapat perbedaan identitas, kepentingan, maupun latar belakang sosial. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat yang kohesif tidak hanya memiliki rasa saling percaya, tetapi juga mampu menerjemahkan kepercayaan tersebut ke dalam tindakan kolektif yang mendukung kesejahteraan umum, seperti partisipasi dalam kegiatan sosial, dukungan terhadap kebijakan publik, serta keterlibatan dalam pemecahan masalah bersama. Dalam perspektif ini, kerja sama sosial menjadi indikator penting karena menunjukkan adanya orientasi kolektif yang melampaui kepentingan kelompok sempit dan diarahkan pada stabilitas serta kesejahteraan masyarakat secara luas (Leininger et al., 2021).

Pemulihan Sri Lanka pasca-krisis tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara negara, komunitas lokal, sektor swasta, serta organisasi internasional. Bentuk kerja sama tersebut tercermin dalam berbagai program strategis, seperti pemulihan ekonomi berbasis komunitas desa, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). International Labour Organization (ILO, 2023) menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan ekonomi lokal yang melibatkan berbagai aktor (multi-stakeholder) mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat setelah krisis. Di samping itu, negara-negara mitra

turut memainkan peran penting dalam membantu stabilisasi Sri Lanka. Panduwawala (2022) mencatat bahwa India memberikan bantuan lebih dari USD 4 miliar dalam bentuk bahan bakar, obat-obatan, dan pangan guna mendukung pemulihan kondisi domestik Sri Lanka. Bantuan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan strategis untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Selatan. Selain India, China, Jepang, dan Uni Eropa juga berkontribusi melalui bantuan teknis maupun dukungan finansial guna mempercepat proses stabilisasi ekonomi Sri Lanka.

Kerja sama internasional yang kuat memungkinkan Sri Lanka memperoleh ruang fiskal untuk melakukan reformasi sosial, termasuk rehabilitasi layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal. Di tingkat domestik, kerja sama lintas komunitas pasca-Aragalaya memperkuat kembali jaringan sosial yang sebelumnya melemah akibat polarisasi politik. Kombinasi dukungan internasional, reformasi domestik, dan keterlibatan aktif masyarakat menciptakan momentum untuk membangun Sri Lanka baru yang lebih inklusif, stabil, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil memainkan peran kritis dalam mengisi kekosongan governance yang muncul selama krisis. Berbagai LSM lokal menginisiasi program solidaritas pangan, klinik kesehatan darurat, dan ruang diskusi publik lintas etnis yang berfungsi sebagai “jembatan sosial” untuk memperbaiki hubungan antar komunitas. Sejalan dengan itu, UNDP melalui Transitional Justice Facility (MPTF-UNDP, 2018) memperluas skema dukungan ekonomi lokal, mendorong partisipasi perempuan, youth-led initiatives, dan program pelatihan literasi keuangan. Model intervensi ini terbukti membantu

mengurangi tensi sosial sekaligus membentuk kembali struktur kepercayaan di level akar rumput.

Pemulihan kohesi sosial juga diperkuat oleh keterlibatan sektor swasta yang ikut berkontribusi pada stabilisasi ekonomi, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan rantai pasok yang lebih resilien. Perusahaan-perusahaan besar Sri Lanka mulai menjalankan corporate social responsibility (CSR) berbasis pemulihan pasca-krisis, seperti bantuan logistik pangan, dukungan energi alternatif, dan pendampingan UMKM. Inisiatif ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung, tetapi juga membangun persepsi publik bahwa pemulihan nasional merupakan upaya kolektif yang melibatkan berbagai aktor, bukan hanya tanggung jawab pemerintah (UNDP, 2025; IFC, 2021). Praktik CSR dalam konteks krisis ekonomi terbukti dapat memperkuat legitimasi sosial perusahaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kohesi sosial dan stabilitas jangka panjang (OECD, 2024).

keterlibatan diaspora Sri Lanka berperan penting dalam pemulihan jangka menengah. Diaspora Tamil, Sinhala, dan Muslim dari negara-negara seperti Kanada, Inggris, dan Australia menggalang dana untuk bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Dukungan eksternal dari diaspora memperkuat jaringan solidaritas global dan membantu memulihkan identitas kolektif Sri Lanka sebagai bangsa yang *resilient* (International Organization for Migration, 2018). Secara konseptual, kontribusi diaspora melalui remitansi, transfer pengetahuan, dan jaringan transnasional terbukti berperan dalam stabilisasi ekonomi serta pembangunan sosial di negara asal (World Bank, 2016). Selain itu, studi empiris

menunjukkan bahwa diaspora dapat berfungsi sebagai aktor rekonsiliasi dan pembangun kohesi sosial dalam konteks pasca-konflik (Alan Gamlen, 2014).

Secara konkret, kerja sama pemerintah Sri Lanka dengan lembaga keuangan internasional—khususnya International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), dan World Bank—menghasilkan stabilisasi makroekonomi yang menjadi prasyarat utama bagi pemulihan kohesi sosial. Program Extended Fund Facility (EFF) IMF yang disepakati pada 2023 memungkinkan Sri Lanka menurunkan tingkat inflasi dari lebih dari 70 persen pada pertengahan 2022 menjadi di bawah 10 persen pada akhir 2023, serta memulihkan ketersediaan bahan bakar dan listrik secara bertahap (IMF, 2023). Stabilitas ini berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat, karena berkurangnya antrean BBM, normalisasi transportasi publik, dan pulihnya aktivitas ekonomi sehari-hari secara signifikan menurunkan ketegangan sosial yang sebelumnya memicu konflik horizontal. Dengan demikian, pemulihan ekonomi makro melalui kerja sama internasional berfungsi sebagai social stabilizer yang meredam fragmentasi sosial pasca-krisis.

Selain stabilisasi makro, kerja sama lintas aktor juga berdampak pada penguatan kohesi sosial di tingkat lokal melalui program-program berbasis komunitas. Data United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan bahwa program pemulihan mata pencaharian, bantuan tunai bersyarat, serta *community livelihood recovery* yang dilaksanakan pasca-krisis menjangkau lebih dari 1,5 juta rumah tangga rentan, termasuk di wilayah Utara dan Timur yang selama ini termarginalkan secara ekonomi dan politik (UNDP, 2018). Program ini tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga mendorong interaksi lintas etnis dalam pengelolaan bantuan sosial, koperasi desa, serta proyek

padat karya berbasis komunitas. Sejalan dengan temuan International Labour Organization (ILO, 2011), peningkatan partisipasi ekonomi lokal yang inklusif berkorelasi dengan menurunnya konflik sosial mikro dan meningkatnya rasa saling ketergantungan antar kelompok—dua indikator penting dari kohesi sosial yang mulai pulih.

Seterusnya, dampak kerja sama multipihak terhadap kohesi sosial tercermin dalam perubahan sikap publik terhadap negara dan sesama warga. Survei Sri Lanka Barometer pasca-krisis menunjukkan adanya peningkatan moderat dalam kepercayaan publik terhadap institusi negara dibandingkan puncak krisis 2022, terutama di kalangan masyarakat urban dan generasi muda (Fernando, 2023). Meskipun tingkat kepercayaan ini belum sepenuhnya pulih ke level pra-krisis, tren positif tersebut menandakan bahwa kombinasi reformasi kebijakan, dukungan internasional, keterlibatan aktif masyarakat sipil, sektor swasta, dan diaspora telah membentuk kembali persepsi kolektif bahwa pemulihan merupakan proses bersama. Dengan demikian, strategi kerja sama yang dijalankan Sri Lanka pasca-krisis tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi rekonstruksi kohesi sosial—menggeser masyarakat dari kondisi fragmentasi menuju solidaritas berbasis kepentingan bersama (*cooperation for the common good*).

Cooperation for the common good terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aksi kolektif dan dukungan terhadap reformasi. Hal ini menunjukkan adanya orientasi pada kepentingan bersama dalam proses pemulihan kohesi sosial.

Tabel 3.1 Analisis dan Temuan

Dimensi Kohesi Sosial	Peran Pemerintah	Bentuk Kebijakan/Strategi	Dampak terhadap Kohesi Sosial
Inclusive Identity	Membangun identitas nasional yang inklusif dan mengelola keberagaman	Kebijakan non-diskriminatif, rekonsiliasi etnis, pengakuan hak minoritas	Mengurangi polarisasi sosial dan meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging)
Trust (Kepercayaan)	Membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (vertical trust)	Transparansi kebijakan, akuntabilitas pemerintah, pelayanan publik yang efektif	Meningkatkan legitimasi negara dan memperkuat hubungan masyarakat–pemerintah
Trust (Horizontal)	Mendorong kepercayaan antar kelompok masyarakat	Kebijakan sosial inklusif dan distribusi sumber daya yang adil	Mengurangi konflik sosial dan memperkuat solidaritas antar kelompok
Cooperation for the Common Good	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, ruang partisipasi publik	Meningkatkan kerja sama sosial dan orientasi pada kepentingan bersama
Kebijakan Sosial-Ekonomi Inklusif	Menjamin kesejahteraan dan akses layanan publik yang merata	Bantuan sosial, subsidi, stabilisasi ekonomi pascakrisis	Memperkuat stabilitas sosial dan mencegah disintegrasi masyarakat

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Sri Lanka dalam membangun kembali kohesi sosial pasca-krisis multidimensi 2020–2022 yang meliputi krisis ekonomi, politik, dan sosial. Berdasarkan pembahasan pada Bab II dan Bab III, dapat disimpulkan bahwa melemahnya kohesi sosial di Sri Lanka merupakan akibat dari akumulasi kegagalan struktural jangka panjang yang diperparah oleh mismanajemen pemerintahan Dinasti Rajapaksa. Sentralisasi kekuasaan, kebijakan ekonomi populis yang tidak berbasis data, lemahnya tata kelola, serta politik identitas eksklusif telah menggerus legitimasi negara dan merusak hubungan antara negara dan masyarakat.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi 2022 bertindak sebagai katalis yang memperlihatkan secara nyata rapuhnya fondasi sosial Sri Lanka. Ketidakmampuan negara memenuhi kebutuhan dasar—seperti pangan, energi, layanan kesehatan, dan transportasi—tidak hanya menciptakan penderitaan material, tetapi juga memicu runtuhnya kepercayaan publik (trust) terhadap institusi negara. Krisis tersebut berkembang menjadi krisis kohesi sosial ketika masyarakat dari berbagai kelompok etnis dan kelas sosial kehilangan rasa aman sosial (social sense of security), yang selama ini menjadi fondasi stabilitas masyarakat Sri Lanka.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa krisis multidimensi tersebut membuka ruang transformasi sosial dan politik yang signifikan. Pemerintah Sri Lanka pasca-2022 mulai menggeser pendekatan

kebijakan dari model eksklusif dan sentralistik menuju strategi yang lebih inklusif dan partisipatif. Strategi pemerintah dalam memperkuat inclusive identity diwujudkan melalui reformasi sistem jaminan sosial non-diskriminatif, pemerataan layanan publik berbasis wilayah, perluasan partisipasi politik lintas kelompok sosial, revitalisasi agenda rekonsiliasi dan transitional justice, serta perubahan retorika politik menuju narasi collective recovery. Strategi-strategi ini berkontribusi pada menurunnya fragmentasi sosial dan mulai membangun kembali rasa kebersamaan sebagai bangsa.

Selain itu, pemulihan kohesi sosial juga sangat bergantung pada upaya membangun kembali kepercayaan antara negara dan masyarakat. Kerja sama pemerintah dengan lembaga internasional seperti IMF, ADB, dan World Bank menghasilkan stabilisasi makroekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat, seperti normalisasi pasokan energi, penurunan inflasi, dan pulihnya aktivitas ekonomi. Reformasi distribusi bantuan sosial, peningkatan transparansi fiskal, perbaikan komunikasi publik, serta penciptaan peluang ekonomi lokal terbukti menjadi instrumen penting dalam memulihkan trust secara bertahap.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa masyarakat sipil dan gerakan Aragalaya memainkan peran kunci dalam membangun kohesi sosial pasca-krisis. Aragalaya tidak hanya menjadi bentuk perlawanan terhadap kegagalan rezim Rajapaksa, tetapi juga menciptakan solidaritas lintas etnis dan kelas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Sri Lanka. Keterlibatan organisasi internasional, sektor swasta, dan diaspora semakin memperkuat kerja sama

multipihak (cooperation for the common good) yang menjadi fondasi penting bagi rekonstruksi sosial jangka Panjang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemulihan kohesi sosial di Sri Lanka pasca-krisis tidak dapat dipahami sebagai hasil dari satu kebijakan tunggal, melainkan sebagai proses multidimensional yang melibatkan reformasi struktural, rekonsiliasi sosial, kerja sama lintas aktor, serta perubahan relasi negara–masyarakat. Krisis 2022 menjadi titik balik yang membuka peluang bagi Sri Lanka untuk membangun tatanan sosial yang lebih inklusif, akuntabel, dan berketahanan, meskipun tantangan politik dan institusional masih sangat besar.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

4.2.1 Rekomendasi bagi Pemerintah Sri Lanka

Pemerintah Sri Lanka perlu memastikan keberlanjutan strategi pemulihan kohesi sosial dengan memperkuat reformasi institusional secara konsisten. Reformasi fiskal dan ekonomi yang disyaratkan oleh IMF harus diimbangi dengan perlindungan sosial yang memadai agar tidak memperdalam ketimpangan dan kerentanan baru. Pemerintah juga perlu menginstitusionalisasikan mekanisme partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar menjadikannya respons sementara terhadap tekanan krisis.

Selain itu, agenda rekonsiliasi dan transitional justice harus dilaksanakan secara lebih substantif dan berkelanjutan, terutama dalam penyelesaian isu historis komunitas Tamil dan Muslim. Penguatan pemerintahan lokal, pemerataan layanan publik, serta penghapusan praktik diskriminatif harus menjadi prioritas untuk

membangun identitas kebangsaan yang benar-benar inklusif. Tanpa komitmen jangka panjang terhadap keadilan sosial dan kesetaraan, pemulihan kohesi sosial berisiko bersifat semu dan tidak berkelanjutan.

4.2.2 Rekomendasi bagi Masyarakat Sipil dan Aktor Non-Negara

Masyarakat sipil perlu mempertahankan momentum partisipasi politik yang muncul pasca-Aragalaya dengan memperkuat kapasitas advokasi, pengawasan kebijakan publik, dan dialog lintas komunitas. Organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan kelompok pemuda perlu berperan sebagai jembatan sosial yang menghubungkan negara dan masyarakat, terutama di wilayah pasca-konflik dan daerah tertinggal.

Sektor swasta dan diaspora Sri Lanka juga diharapkan terus terlibat dalam upaya pemulihan melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan investasi sosial yang inklusif. Kolaborasi lintas sektor harus diarahkan tidak hanya pada pemulihan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kohesi sosial dan pengurangan ketimpangan struktural.

4.2.3 Rekomendasi bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pemulihan kohesi sosial Sri Lanka melalui pendekatan empiris berbasis data lapangan, seperti survei persepsi publik, studi etnografi komunitas, atau analisis kebijakan komparatif dengan negara pasca-krisis lainnya. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperdalam peran generasi muda dan media digital dalam membentuk identitas kebangsaan baru serta menjaga keberlanjutan solidaritas pasca-Aragalaya.

Kajian longitudinal juga penting dilakukan untuk menilai apakah reformasi pasca-krisis benar-benar menghasilkan peningkatan kohesi sosial jangka panjang

atau hanya bersifat sementara. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih kuat bagi pengembangan teori dan praktik pembangunan kohesi sosial di negara-negara yang mengalami krisis multidimensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Keenan, A. (2022, July 18). *Sri Lanka's uprising forces out a president but leaves system in crisis*. International Crisis Group.
- Anwar, A. (2022, July 28). *Family ties led to Sri Lanka's collapse: What does this mean for South Asia?* Council on Foreign Relations.
- Asian Development Bank. (2022, September). *Sri Lanka: Macroeconomic update and outlook*.
- Arant, Regina, Mandi Larsen, and Klaus Boehnke. "Acceptance of Diversity as a Building Block of Social Cohesion: Individual and Structural Determinants." *Frontiers in Psychology* 12 (2021).
- Arant, Regina, Christin Larsen, and Klaus Boehnke. 2021. *Social Cohesion and the Acceptance of Diversity in Europe and Beyond*. Cham: Springer.
- Athukorala, P.-C. (2014). *Sri Lanka's post-conflict development challenge: Learning from the past* (Working Papers in Trade and Development).
- Attanayake, C. (2018, November). *Mahinda Rajapaksa: An influential figure in Sri Lanka politics*. Institute of South Asian Studies.
- Åkebo, Malin, dan Sunil Bastian. 2021. "Beyond Liberal Peace in Sri Lanka: Victory, Politics, and State Formation." *Journal of Intervention and Statebuilding* 16 (1): 1–20.
- "Accommodating Minorities into Sri Lanka's Post-Civil War State System: Government Initiatives and Their Failure." 2020. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9 (6): 290–300.
- Burchi, Francesco, et al. "Can Integrated Social Protection Programmes Affect Social Cohesion? Mixed-Methods Evidence from Malawi." *The European Journal of Development Research* 35, no. 2 (2022).
- Burchi, Francesco, et al. 2022. *Social Protection and State Legitimacy in Fragile Contexts*. Rome: Food and Agriculture Organization (FAO).
- Devotta, N. (2010). From civil war to soft authoritarianism: Sri Lanka in comparative perspective. *Global Change, Peace & Security*, 22(3), 331–343.
- DeVotta, Neil. 2022. "Sri Lanka's Political Crisis and the Failure of Governance." *Journal of Democracy* 33 (4): 45–59.

- Handunnetti, D. (2022, July 15). *The divisive legacy of Sri Lanka's Gotabaya Rajapaksa*. Al Jazeera.
- Fernando, A. F. (2022, July 10). *Krisis Sri Lanka, kehidupan yang penuh kesedihan di negara bangkrut: Makan dengan lauk sambal kelapa, listrik mati berjam-jam, antre berhari-hari untuk beli BBM*. BBC News Indonesia.
- Gamage, R., & Khattri, R. (n.d.). *Post-economic crisis reforms in Sri Lanka: Comparative insights from India*. NUS Institute of South Asian Studies.
- Gamlen, A. (2014). Diaspora institutions and diaspora governance. *International Migration Review*, 48(1).
- Ghoshal, D., & Jayasinghe, U. (2022, April 9). *Sri Lanka to seek \$3 billion to stave off crisis*. Reuters.
- Goodhand, Jonathan. 2010. "Stabilising a Victor's Peace? Humanitarian Action and Reconstruction in Eastern Sri Lanka." *Disasters* 34 (1): S342–S367.
- Gunaratne, J. (2026). *Political landscape of Sri Lanka's 2022 economic crisis*.
- Haniffa, F. (2021). Sri Lanka: Situation and treatment of Muslims by society and the authorities; state protection. *Immigration and Refugee Board of Canada*.
- Human Rights Watch. (n.d.). *World Report 2023: Sri Lanka*.
- IDN Times. (2023). *Ini strategi Sri Lanka untuk keluar dari krisis ekonomi*.
- Imtiyaz, A. R. M., & Saleem, A. M. (2023). Some critical notes on Sri Lankan Muslim religious identity formation, conservatism, and violent extremism. *Journal of Asian and African Studies*, 58(3), 438–451.
- International Finance Corporation. (2021, December 1). *IFC and private sector response to crisis and building resilient supply chains*.
- International Labour Organization. (n.d.). *The care economy and decent work in Sri Lanka: Opportunities, challenges and future trends*.
- International Organization for Migration. (2021). *Sri Lanka immigration governance indicators*. Geneva.
- Chotiner, I. (2022, July 22). *The hope and fear of the Sri Lankan protest movement*. The New Yorker.
- Iswara, A. J. (2022, June 30). *Sri Lanka bangkrut, IMF minta 2 hal ini untuk keluar dari krisis*. Kompas.com.

- Johansson, A. (2022, May 3). *Sri Lanka's protests show a fragile unity—for now*. The Conversation.
- Pathi, K. (2022, July 14). *A brief history of the rise, fall of Sri Lanka's president*. AP News.
- Leininger, J., Burchi, F., Fiedler, C., et al. (n.d.). *Social cohesion: A new definition and a proposal for its measurement in Africa*.
- Lewis, David. 2010. "Post-War Sri Lanka and the Limits of Liberal Peacebuilding." *Journal of Intervention and Statebuilding* 4 (4): 443–462.
- Lewis, David G. "Sri Lanka's Schmittian Peace: Sovereignty, Enmity and Illiberal Order." *Conflict, Security & Development* 20, no. 1 (2020): 15–37.
- Luthfan, M. (2022, July 10). *Kronologi krisis di Sri Lanka: Keadaan darurat hingga presiden mundur*. Kumparan News.
- Martin, N. (2022, July 23). *How will Sri Lanka salvage its economy?* DW.
- DeVotta, N. (2022, July 12). *Sri Lanka's road to crisis was political, not economic*. Foreign Policy.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD survey on drivers of trust in public institutions: 2024 results*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Trust and public policy: How better governance can help rebuild public trust*. Paris.
- Orjuela, C. (2003). Building peace in Sri Lanka: A role for civil society? *Journal of Peace Research*, 40(2).
- Panduwawala, T. (2022). *India's extraordinary support during Sri Lanka's crisis: Motivations and impacts*.
- Goonewardena, Kanishka. "Populism, Nationalism and Marxism in Sri Lanka: From Anti-Colonial Struggle to Authoritarian Neoliberalism." *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography* 102, no. 3 (2020): 289–304.
- Salikuddin, T. (2022, July 15). *Five things to know about Sri Lanka's crisis*. United States Institute of Peace.
- Senevirathna, Asantha. "Sri Lanka and the Covid 19 Crisis: Strategies and Future Challenges." *Tribhuvan University Journal* 34 (2020): 147–158.
- The Guardian. 2022. "Sri Lanka Security Forces Raid Protest Camp as Ranil Wickremesinghe Flexes Muscles." July 22, 2022.

- Tonkov, P., & Vigers, B. (2023, July 11). *Sri Lankans struggling as country caps turbulent year*. Gallup.
- Torri, M., Boni, F., Maiorano, D., & Valdameri, E. (2024). Asia in 2024: Fragile democracies amid global turmoil. *Asia Maior*, XXXV.
- United Nations Development Programme. (2025). *Sri Lanka economic crisis: UNDP private sector engagement and response brief*. New York.
- United Nations Development Programme. (n.d.). *United Nations sustainable development framework 2018–2022: Sri Lanka*.
- World Bank. (2018). *The state of social safety nets 2018* (Vol. 2).
- World Bank. (2022). *Sri Lanka development update: Protecting the poor and vulnerable in a time of crisis*.
- World Bank Group. (2016). *Migration and remittances factbook 2016* (3rd ed., Vol. 2).
- World Food Programme. (2022). *Remote household food security survey brief (m-VAM): Sri Lanka*.
- Wulandhari, R. (2022, June 9). *Krisis ekonomi, Sri Lanka butuh Rp72 triliun untuk penuhi kebutuhan pokok*. Republika.
- Devotta, N. (2010). From civil war to soft authoritarianism: Sri Lanka in comparative perspective. *Global Change, Peace & Security*, 22(3), 331–343.
- DeVotta, Neil. 2022. “Sri Lanka’s Crisis: Causes, Consequences, and Prospects.” *Journal of Democracy* 33 (3): 141–55.
- International Crisis Group. 2022. *Myanmar’s Post-Coup Conflict*. Brussels: International Crisis Group.
- International Monetary Fund. 2023. *IMF Reaches Staff-Level Agreement on the First Review of Sri Lanka’s Extended Fund Facility Arrangement*. Washington, DC.
- Keenan, Alan. 2022. *Sri Lanka’s Aragalaya Protest Movement*. Brussels: International Crisis Group.
- Reuters, 2024. “Tamils Faced Torture in Sri Lanka Long after War, Rights Group Says.” May 8, 2024.

- Reuters. 2024. "Sri Lanka Committed to Repaying Debt within 2027–2042 Schedule, President Says." March 6, 2024.
- World Bank. 2023. *Bangladesh Development Update: Trade Reform—An Urgent Agenda*. Washington, DC: World Bank.
- DeVotta, Neil. 2022. "Sri Lanka's Return to Rajapaksa Rule." *Journal of Democracy* 33(1): 94–108.
- Imtiyaz, A. R. M. 2023. "Ethno-Religious Polarization in Sri Lanka." *Asian Affairs* 54(2): 210–225.
- International Crisis Group. 2021. *Sri Lanka: Crisis of Governance*. Brussels.
- International Crisis Group. 2023. *Sri Lanka's Economic Crisis and Political Transition*. Brussels.
- International Monetary Fund. 2023. *Sri Lanka: Technical Assistance Report—Governance Diagnostic Assessment*. Washington, DC.
- International Crisis Group. 2023. *Sri Lanka's Economic Crisis and Political Transition*. Brussels.
- International Monetary Fund. 2023. *Sri Lanka: Request for an Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility*. Washington, DC.
- World Bank. 2023. *World Bank Group Adopts Country Partnership Framework for Sri Lanka*. Washington, DC.
- Uyangoda, Jayadeva. 2021. "Sri Lanka's 20th Amendment and Democratic Backsliding." *Economic and Political Weekly* 56(45).
- World Bank. 2023. *World Bank Group Adopts Country Partnership Framework for Sri Lanka*. Washington, DC.